

SKRIPSI

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MEWUJUTKAN OTONOMI DESA DI DESA RAMBAH JAYA KECAMATAN BANGUN PURBA KABUPATEN ROKAN HULU

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos) Pada Fakultas Ekonomi
Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau



Oleh
Sugeng Tri Handoko
NIM 10576002280

Jurusan Administrasi Negara
Program S1

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2010

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : SUGENG TRI HANDOKO
NIM : 10576002280
JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL SKRIPSI : PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) DALAM MEUJUTKAN OTONOMI DESA DI
DESA RAMBAH JAYA KECAMATAN BANGUN
PURBA KABUPATEN ROKAN HULU

DISETUJUI OLEH

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Rusdi, MA
NIP 150 416 548

Ferizal Rachmat, SE, MM
NIK 130 707010

MENGETAHUI

DEKAN

KETUA JURUSAN

Drs. Azwar Harahap, M.Si
NIP. 195602021984031002

Drs. Almasri, M.Si
NIP. 196 70801 200 5011007

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : SUGENG TRI HANDOKO
NIM : 1057600200
JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL SKRIPSI : PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA (BPD) DALAM MEWUJUTKAN
OTONOMI DESA DI DESA RAMBAH JAYA
KECAMATAN BANGUN PURBA
KABUPATEN ROKAN HULU
HARI / TANGGAL : SENIN / 25 JANUARI 2010

PANITIA PENGUJI

KETUA

SEKRETARIS

Drs. Azwar Harahap, M.Si
NIP. 195 60202 198 403 1002

Irien Violinda Anggaini, SE
NIP. 150 042 186

ANGGOTA

PENGUJI I

PENGUJI II

Drs. Almasri, M. Si
NIP. 196 70801 200 501 1007

Rusdi, S .Sos, MA
NIP. 150 390 416

ABSTRAKSI

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MEWUJUTKAN OTONOMI DESA DI DESA RAMBAH JAYA KECAMATAN BANGUN PURBA KABUPATEN ROKAN HULU

Terbentuknya sebuah lembaga didalam Desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah yang kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, sebelumnya pernah juga disinggung pada Undang-Undang 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Dan Peraturan Daerah (PERDE) Nomor 41 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Desa, Keberadaan BPD ini diharapkan akan mampu menjadi sarana bagi masyarakat Desa untuk menyatukan aspirasi yang selama ini tidak optimal dan dengan terbentuknya BPD dapat difungsikan sebagai mitra kerja Kepala Desa didalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mewujudkan Otonomi Desa di Desa Rambah Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu

Metode penelitian yang digunakan adalah diskriptif kualitatif yaitu melihat keadaan yang terjadi pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rambah Jaya dalam melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dilihat beberapa hal penting yang dilakukan oleh BPD didalam melakukan Perannya terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah melakukan fungsi, walaupun belum maksimal didalam proses menjalankan fungsinya, agar penyelenggaraan Pemerintahan Desa bisa berjalan semaksimal mungkin.

Namun didalam menjalankan fungsinya banyak hal yang perlu diperhatikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rambah Jaya, dalam hal ini terutama sekali yang perlu diperhatikan adalah faktor Sumber Daya Manusia (SDM) anggota BPD itu sendiri agar lebih berkualitas didalam menghadapi perkembangan Otonomi Daerah dan Otonomi Desa sehingga dapat memberikan peran yang lebih efektif.

DAFTAR ISI

ABSTRAKSI	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
I.1 Latar Belakang Masalah	1
I.2 Perumusan Masalah	7
I.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan	7
I.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II : TELAAH PUSTAKA	
II.1 Kerangka Teori	9
a. Pengertian Peranan	9
b. Pengertian Desa	10
c. Pemerintahan Desa	13
d. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	19
e. Otonomi Desa	28
II. 2 Definisi Konsep	32
II.3 Operasional Variabel	28
2.4 Hipotesa	33
BAB III : METODE PENELITIAN	
III.1 Jenis Penelitian	35
III.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	35
III.3 Populasi dan Sample	35
III.4 Sumber Data	37
III.5 Teknik Pengumpulan Data	37
III.6 Teknik Analisa Data	38

BAB IV : GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

IV.1 Sejarah Singkat Desa	39
IV.2 Geografis dan Demografis Desa	40
a. Geografis Desa	40
b. Demografis Desa	41
IV.3 Sejarah Badan Permusyawaratan Desa	47
IV.4 Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Fungsi	48
a. kedudukan	48
b. Tugas dan Wewenang	48
c. Fungsi	49
IV.5 Struktur Organisasi dan Urutan Tugas	49

BAB V : PENYEJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

V.1 Identitas Responden	51
V.2 Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Dari Variable Penelitian.....	54
V.3 Analisis Identitas Responden	76
V.4 Peranan Badan Permusyawaratan Desa	78

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

VI.1 Kesimpulan	88
VI.2 Saran	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai Negara Kesatuan, Republik Indonesia menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. didalam pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah diterangkan bahwa pembagian daerah di Indonesia berdasarkan atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan pemerintahannya ditetapkan oleh Undang-Undang.

Kebijakan Otonomi Daerah yang diharapkan adalah sebuah kebijakan otonomi yang mandiri dengan harapan dapat mewedahi dan memberikan respon secara aktif terhadap kebutuhan, kehendak dan aspirasi masyarakat. Pengembangan dan pembangunan Otonomi Daerah tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diarahkan untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat dengan maksud untuk lebih meningkatkan pelayanan dan partisipasi aktif masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan disegala bidang khususnya yang ada didaerah maupun ditingkat nasional.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada tanggal 15 Oktober Tahun 2004, telah memberi wewenang sebesar-besarnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban

kepada daerah untuk mengelola dan mengatur sendiri daerahnya dalam sistem penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang juga mengatur Pemerintahan Desa menegaskan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur desa dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada dalam kecamatan, kabupaten dan provinsi.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa yang menyangkut tentang peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dijelaskan dalam pasal 35 yang menerangkan tentang wewenang BPD mengenai pelaksanaan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa. Dari Peraturan Pemerintah tersebut sangat jelas bahwa, peran yang dilakukan BPD terhadap Pemerintah Desa sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang sangat seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Didalam usaha mewujudkan Otonomi Desa diharapkan peran BPD Terhadap pembangunan desa dalam berbagai bidang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya dalam menyikapi tuntutan implementasi Otonomi Daerah sangat memerlukan proses untuk menggalang aspirasi masyarakat.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sangat memberikan harapan yang besar bagi masyarakat terhadap sebuah implementasi Otonomi Daerah. Hal ini menjadi motivasi dan memberi dinamika serta suasana baru dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di desa. Sebab,

masyarakat menyadari bahwa keberadaan institusi-institusi demokrasi desa selama ini berada dalam kondisi yang tidak kondusif dalam kemajuan kemajuan Pemerintahan Desa.

Melihat fenomena yang sedemikian rupa, maka sangat diperlukan sebuah badan yaitu Badan Permusyawaratan Desa didalam sebuah proses penyelegaraan Pemerintahan Desa yang merupakan subsistem dalam system penyelenggaraan Pemerintahan Nasional. Sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat serta mengatur rumah tangganya sendiri.

Badan Permusyawaratan Desa terbentuk berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001, serta Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 41 Tahun 2002. tentang Desa, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, Menurut konstitusi tersebut, anggota Badan Perwakilan Desa (sekarang Badan Permusyawaratan Desa) dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat.

Badan Permusyawaratan desa (BPD) tersebut adalah sebuah konsekuensi implementasi Otonomi Daerah sebagai fundamental pergeseran struktur politik Pemerintah Desa. Eksistensi lembaga ini memiliki tugas, fungsi, kedudukan dan wewenang yang tidak kalah pentingnya dengan pihak eksekutif desa. Mencermati Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, aturan ini juga menjelaskan tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa lembaga ini mempunyai tugas dan misi luhur yang berfungsi mengayomi adat istiadat,

membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sebagai lembaga legislatif tingkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi sebagai, Legislasi, Anggaran dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa, lembaga ini mengawasi apakah peraturan desa yang telah dibuat dilaksanakan oleh Pemerintah Desa atau tidak serta apakah implementasi peraturan itu sesuai atau tidak dengan yang telah dibuat.

Oleh karena itu, ada beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian kita dengan dibentuknya Badan Permusyawaratan Desa. *Pertama*, lahirnya BPD hendaknya memberikan harapan baru bagi demokrasi desa. BPD diharapkan menjadi arena baru demokrasi desa, antara lain menjadi tempat pembuatan peraturan desa yang berbasis pada artikulasi kepentingan masyarakat serta mampu melakukan control pengawasan terhadap sepak terjang Pemerintah Desa. Sebab masalah yang dihadapi masyarakat desa kian kompleks dan memerlukan perhatian sungguh-sungguh dari berbagai pihak. *Kedua*, perlu dilakukan *capacity building* pengembangan kemampuan BPD sebagai institusi publik ditingkat desa. *Ketiga*, mengenai sistem pemilihan rekrutmen dan pengisian anggota BPD hendaknya memperhatikan aspek yang tinggi aspiratif dan mempertimbangkan kualitas figur sesuai dengan persyaratan tambahan yang memungkinkan untuk dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik desa. *Keempat*, pembentukan BPD hendaknya menjadi aset pengembangan demokrasi dimasyarakat desa dari pada sebuah konflik yang mendatangkan prahara yang tak kunjung reda. (Khairul Anwar, 2003 : 5-6)

Fungsi kontrol yang dimiliki BPD hendaknya diarahkan pada upaya terselenggaranya Pemerintahan Desa yang berkualitas, dinamis, transparan, baik dan bersih. Serta mampu memberi perubahan bagi terciptanya Pemerintahan Desa yang unggul.

Desa Raambah Jaya adalah salah satu desa yang berada di kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu yang memiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perannya sangat dituntut oleh masyarakat serta kebijakan yang dikeluarkan mampu membawa efek positif kepada masyarakat yang diwakilinya.

Namun kenyataan yang terjadi dilapangan, bahwa Badan Permusyawaratan Desa di Desa Rambah Jaya Kecamatan Bangun Purba perannya masih kurang optimal. Hal ini terbukti *pertama*, lemahnya antara BPD dengan masyarakat dalam bidang pembangunan desa seperti perbaikan jalan yang belum dilakukan dan perbaikan rumah miskin belum dilaksanakan. *Kedua*, lemahnya BPD dalam mengawasi anggotanya untuk siap melayani masyarakat yang memiliki kepentingan masih kurang kondusif. *ketiga*, pengurus dari BPD sendiri dari ketua, wakil dan anggotanya kurang mempunyai wawasan tentang Pemerintahan Desa, sehingga apa yang seharusnya dilakukan oleh BPD belum dapat diterapkan sebagaimana yang harus dilakukan oleh BPD. *Keempat*, kurangnya kerja sama yang baik antara BPD dengan Kepala Desa didalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sehingga apa yang menjadi program BPD dan Kepala Desa tidak berjalan secara optimal. *Kelima*, masih lemahnya komunikasi BPD dengan masyarakat didalam proses pembangunan di Desa, sehingga pembangunan yang ada didesa tidak berjalan dengan baik. Seperti

pembangunan jalan yang dilakukan oleh desa yang masih terkedala dikarenakan kurang kekompakan antara BPD, Kepala Desa dan masyarakat. Jika peran BPD sungguh-sungguh dilaksanakan dalam pengawasan jalannya Pemerintahan Desa, maka peraturan dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan dan BPD dapat benar-benar dapat melaksanakan tugasnya didalam mengawasi jalannya penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Didalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rambah Jaya BPD harus mempunyai peran aktif didalam proses pelaksanaan Pemerintahan Desa. Karena tanpa kontrol yang optimal bisa mengakibatkan kendala dalam menjalankan program yang telah direncanakan. Jadi, peran dari BPD sangat diperlukan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Pemerintahan Desa agar berjalan berdasarkan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Setiap anggota BPD sebagai wakil rakyat di tingkat desa memiliki basis legitimasi yang cukup kuat dikarenakan dipilih dan oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bertanggung jawab kepada masyarakat melalui BPD serta memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati. Oleh karena itu, keberadaan BPD secara normatif memadai terbentuknya lembaga kontrol Kepala Desa dengan menjalankan fungsi *checks and balance* dalam Pemerintahan Desa.

Permasalahan saat ini apakah Badan Permusyawaratan Desa Rambah Jaaya dapat menjalankan tugasnya dengan baik atau perubahan peran ini hanya bersifat teoritis sehingga pada tatanan implementasi tidak berperannya lembaga

ini yang dibentuk oleh Pemerintah dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga legislatif desa.

Berangkat dari latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Otonomi Desa di Desa Rambah Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu* ”

B. Perumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, maka permasalahan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah *Bagaimana Pelaksanaan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Otonomi Desa di Desa Rambah Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu.*

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Otonomi Desa di Desa Rambah Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu.

Kegunaan penelitian :

1. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang Peran badan permusyawaratan desa dalam mewujudkan Otonomi Desa dan tidak hanya sebatas teori tetapi praktek dilapangan.
2. Bagi Fakultas, untuk memperbanyak referensi karya ilmiah yang menyangkut Pelaksanaan otonomi Desa dalam mewujudkan.
3. Sebagai masukan bagi pemerintah setempat di Kabupaten Rokan Hulu.

D. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab ini terdiri atas Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Metodologi Penelitian

Bab ini terdiri dari pengertian Badan Permusyawaratan Desa, Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), definisi konsep, operasional variabel, Hipotesa.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini terdiri dari Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel, Teknik Penarikan Sampel, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisa Data.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. Kerangka Pikiran

Pada suatu proses penelitian ilmiah sebagai usaha untuk memperdalam suatu permasalahan maka fungsi kerangka teori sangat membantu dalam menentukan tujuan dan arah penelitian dalam memilih konsep-konsep yang tepat. Dengan demikian dalam pemecahan masalah akan tampak lebih jelas sesuai dengan teori itu sendiri. Maka penulis beranjak dalam melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan kondisi organisasi dimana lembaga itu berada dari adanya teori-teori yang tepat yang dapat mendukung dalam upaya pemecahan masalah dalam penelitian penulis.

1. Pengertian Peranan

Berdasarkan referensi yang telah terkumpul, belum ada persamaan persepsi tentang arti kata peranan. Karena itu dalam rangka menyatukan persepsi, maka berikut ini akan disajikan beberapa definisi tentang kata peranan. Menurut Soejono Soekanto (2005 : 243) Peranan adalah *pertama*, merupakan aspek dinamis kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya dalam hal ia menjalankan suatu peranan. *Kedua*, peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang dan peranan itu menyebabkan seseorang pada batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. *Ketiga*, peranan adalah diatur norma-norma yang berlaku misalnya norma

kesopanan menghendaki agar seseorang laki-laki bila berjalan bersama seorang wanita, harus disebelah luar.

Menurut Miftah Toha (1990 : 25) peranan dirumuskan suatu rangkaian perilaku yang tujuannya ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal.

Sedangkan menurut kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan peranan adalah suatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Dengan demikian peranan mencakup paling sedikitnya dalam tiga hal yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat dalam masyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep atau prihal apa yang didapat oleh individu didalam masyarakat didalam suatu organisasi.
3. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu dalam struktur sosial masyarakat, (Soejono Soekanto 2005 : 244)

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu komplek penghargaan seseorang terhadap cara menentukan sikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan atas kedudukan tertentu dalam keadaan sosial tertentu.

1. Pengertian Desa

Menurut Suhartono (2000 : 12) Desa mengandung arti sebagai tempat orang hidup dalam ikatan keluarga dalam suatu kelompok perumahan dengan saling ketergantungan yang besar dibidang sosial ekonomi

Bintarto 1983 dalam Sadu Wasistiono (2007 : 8) yang memandang desa secara geografi, mendefenisikan desa sebagai suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya, hasil dari perpaduan itulah suatu wujud penampakan dimuka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial ekonomis, politis dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungan dengan daerah lain

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri didalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kendati membuat konsep hak untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, akan tetapi bersamaan itu pula dinyatakan bahwa Desa merupakan representasi pemerintahan pusat, artinya bahwa apa yang dianggap baik oleh Pemerintah Pusat, maka harus dipandang baik pula oleh Pemerintah Desa. Konstitusi tersebut menunjukan sangat jelas suatu skema sentralisasi. Skema tersebut dimanifestasikan dalam rumusan jabatan Kepala Desa sebagai penguasa tunggal. Kendati terdapat unsur lain diluar pemerintahan desa yaitu Lembaga Musyawarah Desa (LMD), akan tetapi keberadaan lembaga tersebut hanya sekedar formalitas demokratis. Pada kenyataannya keberadaan lembaga tersebut sangat tergantung pada figur Kepala Desa, karena yang menjadi ketua lembaga Musyawarah Desa (LMD) tersebut juga oleh Kepala Desa. Rangkap jabatan tersebut terjadi karena ingin mencapai efisiensi dan efektivitas kerja pemerintahan desa. Selain itu juga

faktor sumber daya manusia (SDM) juga dijadikan alasan atau dalih. Pada masa ini yang terpenting adalah bukan pegawainya yang banyak tapi program kerja yang banyak.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/ atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional yang berada didalam Kabupaten/ Kota. Desa tidak menjadi bawahan kecamatan tetapi merupakan daerah yang diotonomkan. Didalam perubahan ini yang hal penting adalah adanya pemisahan fungsi lembaga legislatif dengan lembaga eksekutif. Pemisahan tersebut menjadi tugas yang tidak ada klausul mengenai posisi Kepala Desa di institusi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Eksekutif) dikontrol oleh Badan Permusyawaratan Desa (Legislatif). Regulasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah memberikan berbagai peluang bagi masyarakat desa untuk meningkatkan partisipasinya dalam pembangunan desa. Pada prinsipnya pembangunan nasional tercapai jika pembangunan pada tingkat desa tercapai. Realitas ini didasarkan pada asumsi bahwa mayoritas rakyat Indonesia tinggal di Desa.

Didalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 disebutkan bahwa dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dibentuk Pemerintahan Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai

lembaga eksekutif dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislatif desa. Format ini merujuk pada istilah Pemerintahan Daerah yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah (eksekutif daerah) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif daerah). Dengan demikian dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dibentuk Pemerintahan Desa yang “*Inheren*” namun otonom. Sebagai daerah yang otonom, Pemerintahan Desa tentunya mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada diwilayah Kabupaten.

Pakar sejarah memandang desa sebagai sumber kekuatan dan ketahanan dasar dalam mempertahankan kemerdekaan *community power*. Menurut Muhadan Labowo (2006 : 133) Desa dianggap sebagai sumber nilai luhur yang memiliki karakteristik seperti gotong royong, musyawarah mufakat dan kekeluargaan sehingga menimbulkan berbagai semboyan.

3. Pemerintahan Desa

Hakikat Otonomi Desa adalah efesiensi dan efektifitas dalam menyelenggarakan pemerintahan, yang ada pada akhirnya bernuansa pada pemberian pelayanan kepada masyarakat yang hakikatnya semakin lama semakin baik, disamping memberikan peluang peran serta masyarakat dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan secara luas dalam konteks demokrasi.

Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang menjadi mitra kerja Pemerintah Desa.

Perubahan peraturan tentang pemerintah daerah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah membawa konsekwensi penting terhadap elemen dasar pemerintah, yaitu Pemerintahan Desa. Meskipun tidak begitu signifikan perubahan yang ditampilkan oleh Undang-Undang tersebut dibanding Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, namun dapat dipahami bahwa pengaturan Pemerintahan Desa tampak mengalami perhatian serius oleh pemerintah pusat melalui perubahan format badan-badan pelaksana dan pertanggungjawaban Pemerintah Desa. Pada bagian ini akan dibahas perubahan atas format pemerintahan desa menurut perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan mempersoalkan kembali relativitas Otonomi Desa secara normatif dengan membandingkan dalam realitas penyelenggaraannya.

Pertama, adanya pemisahan antara kekuasaan eksekutif desa dan legislatif desa BPD. Dengan adanya pemisahan tersebut maka kekuasaan mulai dibagi, dipisahkan serta dibatasi. Eksekutif desa tidak lagi menjadi “pusat” dari proses pembuatan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan desa, namun hanya sebagai pelaksana kebijakan. Proses pembuatan kebijakan desa dilakukan dengan jalan melibatkan partisipasi masyarakat melalui saluran formal berupa lembaga legislatif desa BPD dan dapat difungsikan oleh masyarakat untuk melakukan kontrol atas pelaksanaan kebijakan desa yang dilakukan oleh Eksekutif Desa.

Dengan adanya pemisahan kekuasaan antara Eksekutif Desa dengan Legislatif Desa maka telah terjadi perubahan struktur Pemerintahan Desa yang

tidak lagi bersifat sentralistik berganti dengan pengaturan Pemerintahan Desa secara demokratis melalui pemberian wadah bagi adanya partisipasi oleh warga desa.

Kedua, penyederhanaan proses sistem hirarki birokrasi. Jika pada masa orde baru Pemerintah Desa hanya menjadi sub bagian dari Kabupaten yang dapat dikontrol dan diintervensi melalui Kecamatan. Dengan adanya struktur Pemerintahan Desa yang baru, maka kecamatan tidak lagi membawahi desa, dan desa dapat langsung berhubungan dengan Kabupaten. Hubungan antara dua desa dan Kabupaten yang kemudian diatur lebih dalam hubungan-hubungan yang bersifat formalistik.

Hal tersebut misalnya tercermin dalam mekanisme pertanggungjawaban Kepala Desa yang lebih ditekankan untuk diberikan kepada masyarakat melalui lembaga BPD dan ketingkat Kabupaten lebih bersifat pelaporan. Dengan adanya struktur yang demikian, maka jalannya Pemerintahan Desa dapat lebih dikontrol oleh masyarakat desa itu sendiri dan bukan oleh pemerintahan yang lebih atas. Dengan kata lain proses yang terjadi di desa lebih ditekankan pada dinamika internal desa dibandingkan dengan instruksi dari hirarki pemerintah di atasnya.

Badan permusyawaratan desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat bersama kepala desa. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai lembaga legislatif, BPD mempunyai hak untuk menyetujui atau tidak terhadap Kebijakan

Desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa. Lembaga ini juga dapat membuat Rancangan Peraturan Desa secara bersama-sama Pemerintah Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Disini telah terjadi mekanisme *check and balance system* dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang lebih demokratis. Dalam komposisi BPD sebagai lembaga pengawasan, BPD memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi kebijakan desa, anggaran dan pendapatan belanja desa APBDesa serta pelaksanaan keputusan Kepala Desa. Selain itu, dapat juga dibentuk lembaga kemasyarakatan desa sesuai dengan kebutuhan desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

Pemerintahan Desa yang didalamnya juga termasuk Badan Permusyawaratan Desa adalah suatu badan untuk pembuatan kebijakan dan peraturan desa yang sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di daerah dimana ia tinggal dan kebijakan ini akan ditetapkan berdasarkan persetujuan Kepala Desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 14 tentang desa menjelaskan tugas, fungsi, kewajiban dan hak kepala desa adalah :

1. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
2. Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud pada ayat 1 Kepala Desa mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama BPD.
 - b. Mengajukan rancangan peraturan desa

- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan desa mengenai rancangan APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
 - e. Membina kehidupan masyarakat desa.
 - f. Membina perekonomian desa.
 - g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
 - h. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat mengajukan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
 - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
3. Kepala Desa mempunyai kewajiban :
- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara kesatuan republik Indonesia.
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - c. Memelihara kesatuan dan ketertiban masyarakat.
 - d. Melaksanakan kehidupan demokrasi
 - e. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
 - f. Menjalin hubungan dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa.

- g. Mentaati dan menegakkan seluruh Peraturan Perundang-Undangan.
 - h. Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa dengan baik.
 - i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
 - j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
 - k. Mendamaikan perselisihan masyarakat didesa.
 - l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.
 - m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
 - n. Memperdayakan masyarakat dan kelembagaan didesa dan
 - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
4. Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati/wali kota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban BPD, serta menginformasikan laporan pertanggungjawaban Pemerintahan Desa kepada masyarakat.
 5. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat 1 kali dalam satu tahun.
 6. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD disampaikan satu kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
 7. Menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada masyarakat dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan

pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.

8. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa digunakan oleh Bupati/Walikota sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
9. Laporan masa jabatan kepala desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan kepada BPD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang pedoman umum pengaturan mengenai desa, Pemerintah Desa dan BPD dapat membangun kerja sama untuk mendorong kemandirian dan kreativitas dalam proses mengelola rumah tangga Pemerintahan Desa dengan memanfaatkan potensi yang ada, konsekwensi dalam hal ini adalah Pemerintah Desa dan BPD harus dapat menggali sumber daya yang tersedia bagi pemanfaatan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat di desa.

3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa adalah badan perwakilan yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat di Desa yang mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Menurut Haw. Widjaja (2003: 165) dijelaskan bahwa BPD berfungsi sebagai lembaga legislatif dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) serta peraturan Kepala Desa.

a. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendasar tentang Pelaksanaan Otonomi Desa Dalam Mewujudkan kemajuan Desa, maka terlebih dahulu diuraikan dan dijelaskan akan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Perubahan konstitusi tentang Pemerintahan Desa dari Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1979 kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, memiliki dampak khusus bagi proses penyelenggaraan pemerintahan desa yang jauh lebih berdaya dan demokratis dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi belaka tetapi Desa merupakan *Independent Community* yakni berhak berbicara atas kepentingan masyarakatnya sendiri. Kehadiran UU No 32 Tahun 2004 tersebut memberikan peluang yang besar bagi masyarakat untuk berperan serta didalam proses pembangunan di pedesaan. Masyarakat berhak mengawasi dan menilai serta mengkritik pemerintah desa didalam penyelenggaraan roda pemerintahan melalui lembaga perwakilannya yaitu Badan Permusyawaratan Desa. Sebagai Lembaga Perwakilan Masyarakat, BPD berfungsi mengayomi adat-istiadat desa, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dalam proses pembangunan.

Selama masyarakat desa dibawah otoriter rezim orde baru (Orba), mereka mengalami tragedi pembodohan struktural yang mengenaskan. Masyarakat Desa hanya dijadikan mobilisasi bagi kepentingan kekuasaan rezim Orba sesaat, setelah itu rakyat ditinggalkan sehingga telah menjadikan masyarakat desa buta politik (Political Blind). Kebijakan politik masa mengambang (Floating Mass) yang didesain oleh rezim orde baru adalah bukti bahwa telah terjadi proses

pembodohan politik pada masyarakat desa. Masyarakat desa seharusnya memiliki otonom dan integritas sebagai kesatuan masyarakat berserta kedaulatan serta hak wilayahnya dalam menjalankan pemerintahan secara mandiri untuk menciptakan kemakmuran warganya. Oleh sebab itu, kehadiran BPD diharapkan mampu memberikan pemberdayaan dan pencerdasan kepada masyarakat desa untuk membangun kemandirian, kreatifitas, mengatur rumah tangga sendiri dan membuka ruang bagi masyarakat desa turut serta dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dilevel desanya masing-masing (Zulfan Heri, 2003: 5).

Sistem Pemerintahan Desa pada masa sekarang ini jika dibandingkan dengan masa orde baru ditandai oleh suatu skema yang lebih otonom, dimana desa tidak menjadi bawahan dan pengawasan langsung kecamatan, karena di desa telah dibentuk Pemerintah Desa sebagai penyelenggaraan roda pemerintahan dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga kontrol serta mitra kerjanya Pemerintah Desa tersebut. Kondisi ini menunjukkan peran serta masyarakat sangat besar didalam kelancaran pembangunan di desa. Peran serta tersebut tentunya diwujudkan dengan partisipasi masyarakat yang tinggi dalam menyampaikan aspirasinya kepada lembaga perwakilan desa (BPD).

Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwakilan masyarakat desa yang dipilih berdasarkan musyawarah dan mufakat, dimana persyaratannya telah diatur didalam peraturan pemerintah dan peraturan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 bahwa, *“Keanggotaan dimana Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan*

paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa”. Berdasarkan ketentuan tersebut terlihat bahwa kualitas Badan Permusyawaratan Desa menjadi modal utama bagi terlaksananya sistem demokrasi di pedesaan. Komposisi keanggotaannya yang relatif sedikit menunjukkan peluang masyarakat untuk menjadi anggota BPD menjadi terselektif.

Badan Permusyawaratan Desa terbentuk berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001, serta Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 41 Tahun 2002. Menurut konstitusi tersebut, anggota Badan Perwakilan Desa (sekarang Badan Permusyawaratan Desa) dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 41 Tahun 2002 yang tentunya berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas, fungsi dan wewenang sebagai berikut:

- a. Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan, sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan.
- b. Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa.

- c. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa.
- d. Menampung aspirasi masyarakat yaitu menanggapi dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat dan instansi yang berwenang.
- e. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
- f. Bersama-sama dengan Kepala Desa membentuk Keputusan Desa
- g. Bersama-sama Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa.
- h. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintahan Desa terhadap rencana perjanjian antara desa dengan pihak ketiga dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa.

Sementara itu, Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi dan wewenang sebagai berikut:

- a. Membahas rancangan dan menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa.
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
- d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.

- e. Menggali,menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.

Berdasarkan kedua peraturan diatas bahwa tidak terjadi perubahan yang *significant* tentang fungsi dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa tersebut. Perubahan peraturan sistem pemerintahan desa terjadi seiring dengan pergantian kepemimpinan bangsa ini. Pada tahun 2004 dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang sistem pemerintah daerah dan pemerintah desa. Didalam konstitusi tersebut dijelaskan bahwa unsur penyelenggaraan pemerintah daerah terdiri dari lembaga eksekutif dan legislatif. Keberadaan lembaga legislatif daerah memiliki kedudukan, wewenang, hak dan fungsi yang sangat berbeda dibandingkan dengan masa orde baru. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi di daerah. Bahkan secara substantif, DPRD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dengan pemerintah daerah. Dari perspektif politik, DPRD memiliki otoritas politik dan independen dalam menjalankan fungsi (Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan). Demikian halnya pada sistem pemerintahan desa yang terdiri dari Eksekutif Desa (Pemerintah Desa) dan Legislatif Desa (Badan Permusyawaratan Desa). Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja dengan pemerintah desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 dan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 41 Tahun 2002 serta Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 disimpulkan bahwa fungsi dan wewenang

Badan Permusyawaratan desa atas tiga fungsi yaitu *Legislasi, Budgetting* dan *controlling*.

1. Fungsi Legislasi

Fungsi legislasi ini terlihat pada keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengesahkan Peraturan Desa (Perdes). Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Peraturan pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 pada pasal 30 ayat (1), kemudian direvisi kepada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dalam Pasal 35 bahwa wewenang Badan Permusyawaratan Desa diantaranya adalah *Membahas Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa. Didalam pembuatan Peraturan Desa (Perdes) tersebut tentunya dimulai dengann suatu perancangan*".

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagai legislasi yakni adanya keterlibatan didalam merumuskan rancangan Peraturan Desa (Perdes). Secara normatif rancangan tersebut bersumber dari dua lembaga yakni **Pertama** rancangan yang berasal dari Eksekutif Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa), **Kedua** rancangan yang berasal dari Legislatif Desa (Badan permusyawaratan Desa) yang disebut rancangan peraturan desa inisiatif. Akan tetapi, kedua rancangan tersebut baru bisa dijadikan Peraturan Desa (Perdes) jika disetujui oleh kedua belah pihak yaitu legislatif dan eksekutif desa.

2. Fungsi Anggaran (Budgetting)

Desa sebagai daerah yang otonom harus mampu mengembangkan dirinya sendiri dalam rangka mencapai kemandirian. Untuk itu Desa dituntut tidak hanya mengharapkan bantuan dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah, akan tetapi

harus mampu mempunyai sumber keuangan sendiri. Sumber pendapatan desa tersebut diatur dan disusun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Desa didanai dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), Bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Didalam pasal 68 dijelaskan bahwa sumber pendapatan desa terdiri dari:

- a. Pendapatan asli desa meliputi hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi warga desa, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/ Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) untuk desa dari retribusi Kabupaten/ Kota sebagian diperuntukan bagi desa.
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) yang pembagiannya setiap desa secara propesional yang merupakan alokasi dana desa.
- d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah.
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Pendapatan perangkat desa banyak tergantung pada kesuburan dan kekayaan desa yang bersangkutan mengingat keadaan ekonomi pedesaan yang kurang stabil akan berpengaruh pada motivasi dan semangat kerja pada unsur penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut. Kemudian semua pendapatan desa

disusun menjadi sebuah Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes). RAPBDes kemudian dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditetapkan dengan peraturan desa. Fungsi ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 pada pasal 30 ayat (2), kemudian direvisi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 73 ayat (3) bahwa Kepala Desa bersama BPD menetapkan APBDes setiap tahun dengan Peraturan Desa.

3. Fungsi Controlling (Pengawasan).

Menurut S. P Siagian (2004 : 49) pengawasan merupakan langkah dan sekaligus fungsi organik manajemen yang sangat penting dikatakan demikian itu karena melalui pengawasanlah diteliti apakah hal yang tercantum akan dilaksanakan dengan baik atau tidak. Menurut Dr. Kartini Kartono (2002 : 153) memberikan pengertian pengawasan adalah pada umumnya para pengikut dapat bekerja sama dengan baik kearah pencapaian sasaran-sasaran dan tujuan umum organisasi. Pengawasan dilakukan untuk mengukur hasil pekerjaan dan menghindari penyimpangan-penyimpangan jika perlu segera melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan-penyimpangan tersebut.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi didalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, artinya institusi ini adalah wadah yang mengakomodir aspirasi masyarakat desa. Didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pada pasal 209 dikatakan bahwa “*BPD berfungsi*

menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat”.

3. Otonomi Desa.

Otonomi Desa menurut **Ryaas Rasyid** dalam **Sutoro Eko**;mempertegas posisi politik dan kewenangan desa bahwa kewenangan mengatur rumah tangga sendiri yang mempunyai pemerintahan sendiri(*self governing community*) berdasarkan adat istiadat setempat

Perwujudan Otonomi Desa adalah suatu peningkatan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi menuju kehidupan dan tradisi penyelenggaraan pemerintahan yang didasari dan digerakan oleh masyarakat dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat desa; artinya masyarakat merasa dan turut bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama bagi sesama warga.

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi didalam penyelenggaraan pemerintahan yakni dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk melaksanakan pemerintahannya. Asas tersebut sebagaimana dinyatakan didalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 yang berbunyi bahwa “ *Negara Indonesia terdiri atas daerah besar dan kecil yang bentuk dan susunannya ditetapkan oleh undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara serta hak asal usul didalam daerah yang bersifat istimewa*”. Sebagai wujud penghormatan terhadap hak asal usul dan identitas kedaerahan, maka dikeluarkanlah kebijakan pemerintah mengenai otonomi

daerah. Kebijakan tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh proses kebijakan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Kebijakan otonomi memberikan kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi yang berkembang pada masyarakat tersebut.

Desa merupakan lingkup wilayah terkecil yang diotonomikan karena mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul dan bersifat istimewa yang dapat menghidupkan kembali identitas kedaerahan. Seiring dengan perkembangannya, terjadi proses reformasi politik dan pergantian pemerintahan pada tahun 1998, kemudian diikuti lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Konstitusi ini berisi antara lain mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Dalam undang-undang ini, spirit pelaksanaan sentralisasi, birokratisasi dan uniformitas seperti pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tidak lagi dilanjutkan sehingga deregulasi dan debirokratisasi terhadap Pemerintahan Desa mulai terjadi. Hal ini diwujudkan dengan adanya kesempatan bagi hidupnya kembali pemerintahan asli ditingkat desa, pengaturan tentang pemerintahan ditingkat desa yang tidak lagi diatur ditingkat nasional namun diserahkan untuk dikelola ditingkat daerah Kabupaten/ Kota. Dengan kata lain, konstitusi ini melahirkan beberapa perubahan sebagai berikut:

1. Dari pengaturan tingkat nasional (UU) menjadi pengaturan daerah tingkat Kabupaten / Kota (Peraturan daerah).

2. Dari uniformitas menjadi variatif.
3. Dari dominasi birokrasi menjadi institusi masyarakat lokal/ adat

Perubahan ini akhirnya membawa implikasi pada munculnya kembali variasi antar daerah dalam model-model pemerintahan ditingkat desa (atau apapun namanya) menjadi sangat besar. Terjadinya variasi antar daerah tersebut semakin nyata, antara lain ditandai dengan semakin maraknya kebangkitan pemerintahan asli sebagai pengganti desa, seperti nagari, kampung dan sebagainya. Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki desa tersebut.

Dalam sejarah perjalanan bangsa ini, peraturan mengenai otonomi desa belum berjalan sebagaimana semestinya, tetapi setidaknya pergantian rezim diikuti dengan perubahan pelaksanaan amanat tersebut kearah yang lebih baik. Perubahan rezim yang terjadi (dalam hal ini pergantian kepemimpinan nasional) sesungguhnya menyimpan tanda tanya yang sangat penting yakni apakah perubahan yang berlansung benar-benar mampu mengakomodasi tuntutan demokratisasi dikalangan masyarakat ataukah sebaliknya.

Bagi pemerintah satuan pemerintahan otonom lahir (diadakan) karena keperluan menampung kebhinekaan sebagai wujud pemencaran kekuasaan dalam negara hukum, penyelenggaraan demokratisasi dan mempercepat kesejahteraan rakyat. Berikut kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah dalam mewujudkan Otonomi Desa yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965. Didalam undang-undang ini dijelaskan bahwa desa ditempatkan sebagai daerah tingkat III dengan tata

dan sebutan desa praja. Namun ini tak pernah terwujud karena tidak dikehendaki oleh rezim orde baru.

- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Pada rezim orde baru ini Desa berkedudukan langsung dibawah Camat, dimana Camat merupakan kepala wilayah yang menjalankan pemerintah vertikal (Dekosentrasi).
- c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Pasca jatuhnya rezim orde baru (orba) undang-undang ini dibentuk untuk menjelaskan bahwa Desa diatur dalam satu undang-undang tentang pemerintahan daerah. Desa merupakan subsistem dari pemerintahan yang pengaturannya lebih lanjut diserahkan kepada daerah Kabupaten/ kota dengan membentuk Peraturan Daerah (Perda).
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Konstitusi ini merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang juga menempatkan Desa dalam satu undang-undang tentang pemerintahan daerah.

Pergantian kepemimpinan nasional pada bangsa Indonesia diikuti pula perubahan perundang-undangan tentang Pemerintahan Desa. Salah satu perubahan tersebut terlihat antara produk Orde Baru yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai produk Orde Reformasi.

2. Depenisi Konsep

Adapun depenisi Konsep yang diajukan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Desa adalah Unsur pemerintahan desa yang merupakan lembaga atau parlemen desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
2. Otonomi desa adalah hak, wewenang dan kewajiban pemerintahan desa untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut hak asal-usul sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rambah jaya adalah pelaksanaan tugas yang menjadi kewajiban dan kewenangan dari lembaga tersebut sebagai parlemen pemerintahan desa rambah jaya meliputi fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

3. Operasional Variabel

Konsep operasional adalah petunjuk pelaksanaan bagaimana cara mengukur suatu variabel. Konsep operasional merupakan uraian dari konsep yang sudah dirumuskan dalam bentuk indikator- indikator sehingga akan lebih memudahkan operasionalisasinya dari suatu penelitian. Berikut ini indikator dari Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Otonomi Desa yakni sebagai berikut :

1. Fungsi Legislasi dengan indikator sebagai berikut :
 - a. Membuat dan merumuskan peraturan desa.
 - b. Pembahasan substansi peraturan desa dengan aspirasi masyarakat desa.
2. Fungsi Anggaran (Budgetting) dengan indikator sebagai berikut :

- a. Keterlibatan langsung dalam merumuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
 - b. Keterlibatan langsung dalam membuat dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
3. Fungsi Pengawasan (Controlling) dengan indikator sebagai berikut :
- a. Menampung aspirasi masyarakat Desa.
 - b. Mengawasi kinerja pemerintah desa.

4. HIPOTESA

Hipotesa adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang kebenarannya harus dibuktikan melalui data yang terkumpul (sugiono,2005:183). Berdasarkan uraian latar belakang perumusan masalah, penulis dapat mengambil hipotesis sebagai berikut : ” Di Duga Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mewujudkan Otonomi Desa, Dilihat dari Fungsi Legislasi, Anggaran, Dan Pengawasan (Controlling) Belum Optimal, Karena minimnya pengetahuan dari BPD tentang peran yang harus dijalankan, sehingga menyebabkan pemerintahan Desa tidak berjalan dengan baik, karena itu : jika peran yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) baik, maka dalam mewujudkan Otonomi Desa Dikatakan Berhasil

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian diskriptif Kuantitatif yaitu suatu proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan objek penelitian secara jelas dan lebih mendetail komprehensif serta untuk menarik generalisasi yang menjalankan variabel yang menyebabkan suatu gejala atau kenyataan sosial.

Penelitian diskriptif Kualitatif bertujuan memperoleh informasi-informasi keadaan saat ini dan kaitannya dengan variabel yang menyebabkan suatu gejala atau kenyataan sosial.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Permusyawaratan desa di Desa Rambah Jaya Kecamatan Bangun Perba Kabupaten Rokan Hulu. Waktu Penelitian dilakukan Pada bulan Agustus 2009

C. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah Wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2005 : 90).

Berdasarkan data yang diterima tahun 2009, jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Rambah Jaya Berjumlah 5 orang dan jumlah

Perangkat Desa di Desa Rambah Jaya 8 orang. Jadi jumlah populasi keseluruhan adalah 13 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, bila populasi besar, maka penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya keterbatasan biaya maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu yang dipelajari, untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (Mewakili) (Sugiono 2005 : 9)

Oleh Karena banyaknya jumlah Populasi pada penelitian ini, maka penulis hanya mengambil 10 % dari populasi yang berjumlah 1835 jiwa. Menulis mengambil sampel dengan menggunakan rumus slovin, yaitu

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan n = Jumlah sampel

N = Besar Populasi

e = Nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan (persentase kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan penarikan sampel sebesar 10%.

$$n = \frac{2039}{1 + 2039(10\%)^2}$$

$$n = \frac{2039}{1 + 2039(0.01)}$$

$$n = \frac{2039}{1 + 20,39}$$

$$n = \frac{2039}{21,39}$$

$n = 95,32$ jadi sampel yang akan diambil 96 orang dari 1853 populasi.

Tabel 1.1 : Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Populasi (Orang)	Sampel (Orang)	Persentase (%)
1	Perangkat Desa	8	8	
2	BPD	5	5	
3	Masyarakat	82	82	
	Jumlah	95	95	100,00

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Rambah Jaya 2009

Didalam penelitian ini yang menjadi populasi dan sampel adalah Badan Permusawaratan Desa (BPD), perangkat Desa dan masyarakat desa Rambah Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu.

D. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden yang hubungan dengan objek penelitian, data ini berupa tanggapan responden dan hasil wawancara serta menyebarkan kuesioner.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh langsung dari desa Rambah Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, seperti suatu organisasi BPD, Monografi desa dan tokoh Masyarakat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan penelitian ini digunakan beberapa pengumpulan data yaitu :

- a. Observasi

Didalam penelitian ini penulis langsung turun mengamati ke lokasi untuk mendapatkan data – data yang berhubungan dengan penelitian.

b. Wawancara

Yaitu berupa tanya jawab langsung dengan responden untuk memperoleh data atau informasi yang relevan dengan penelitian ini dimana dilakukan dengan tatap muka. Wawancara ini dilakukan dengan beberapa tokoh masyarakat desa Bantayan Kecamatan Batu Hampar.

c. Kusioner

Yaitu berupa pertanyaan – pertanyaan yang dipersiapkan penulis terlebih dahulu beserta alternatif jawaban, kemudian dibagikan kepada responden. Responden akan menjawab sesuai dengan alternatif jawaban yang disediakan.

F.Teknik Analisa Data.

Teknik analisa data yang digunakan adalah metode diskriptif kualitatif yaitu menggambarkan/ melukiskan secara sistematis data, karakteristik dilakukan dengan mengumpulkan data, menyusun, merangkum dan menganalisa dan menginterpretasikan kedalam hal yang sebenarnya sehingga dapat menghasilkan gambaran yang jelas, terarah dan menyeluruh dari masalah yang menjadi objek penelitian.

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Desa

Desa Rambah Jaya adalah suatu Desa binaan Program Tranmigrasi, tahun Penempatan 1981. adalah bagian dari wilayah satu Kawasan pemukiman C (SKP.C), sebagai Kepala Wilayah adalah di sebut Kepala Satuan Pemukiman Tranmigrasi (KSPT). Dalam satu kawasan tersebut terdiri dari beberapa wilayah yaitu : Desa Utama (DU), dan ada empat Desa kecil (DK) antara lain : DK. 1 SKP.C, DK. 2 SKP.C, DK. 3 SKP.C, DK. 4 SKP.C. dalam setiap Desa kecil dikepalai oleh satu orang Kepala Unit Pemukiman Tranmigrasi (KUPT). Dari kelima wilayah yang disebutdi atas, sebelum dinamakan Desa Rambah Jaya adalah Sebelumnya Dinakan Desa Kecil 4 C (SKP.C).

Desa Rambah Jaya adalah termasuk Daerah Tingkat II Kabupaten Kampar yang wilayah Kecamatan Rambah (1981-1995).Kemudian dengan adanya perkembangan system Pemerintahan terjadi pemekaran Kecamatan akhirnya desa Rambanh Jaya Masuk dalam wilayah Kecamatan Tambah Hilir (1996-2000), setelah itu terjadi pemekaran kecamatan tahun 2001, desa Rambah Jaya masuk dalam wilayah Kecaamatan bangun Purba sampai sekarang. Desa Rambah Jaya di Pimpin oleh Kepala Desa Terpilih periode 2005-2010 yaitu Handoyo dan Sundaryo sebagai sekretaris Desa.

B. Geografi dan Demografi desa Rambah Jaaya

1. Geografi Desa Rambah Jaya

Desa Rambah jaya merupakan salah satu desa yang terletak di ujung sebelah selatan dari Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan hulu dan bertetangga dengan Kabupaten Rokan Hilir yang termasuk sama – sama Kabupaten baru dalam wilayah Provinsi Riau.

Desa Rambah Jaya memili luas wilayah lebih kurang 10 Km². jarak antara Desa dengan kecamatan 18 km. jarak antara Desa dengan Ibukota Kabupaten sekitar 30 km, dapat ditempu dengan waktu 1 jam dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan jarak antara desa dengan Ibukota Provinsi sekitar 187 km,

Dilihat dari keadaan geografisnya batas wilayah Desa Rambah Jaya Kecamatan Bangun Purba berbatasan dengan :

- a. Disebelah utara Desa Rambah Jaya berbatasan dengan desa Pasir Jaya
- b. Disebelah selatan Desa Rambah Jaya berbatasan dengan desa Pasir Intan.
- c. Disebelah timur Desa Rambah Jaya berbatasan dengan Desa Pasir Agung
- d. Disebelah barat desa rambah jaya berbatasan dengan Reboisasi (HTI) PT Sumatra Silver Lestari (SSL)

Desa Rambah Jaya saat ini dipimpin oleh Handoyo sebagai kepala Desa, Desa Rambah Jaya dan dibantu oleh stafnya atau aparat pemerintahan desa diantaranya :

- a. Seketaris Desa : Sundaryo

- b. Kepala Urusan Pembangunan : Samuri AS
- c. Kepala Urusan Pemerintahan : Sigumono
- d. Kepala Urusan Umum : Paiman

2. Demografi Desa Rambah Jaya

a. Struktur Penduduk

Penduduk yang didomisili di Desa Rambah Jaya Hanya ada suku jawa dan Sunda. Namun mayoritas bersuku jawa. Penduduk Desa Rambah Jaya mayoritas memiliki mata pencaharian sebagai petani, untuk lebih jelasnya tentang penduduk Desa Rambah Jaya dapat dilihat pada table pengklasifikasian penduduk Desa Rambah Jaya Di Bawah ini :

Table IV. 1 Klasifikasi Penduduk Desa Rambah Jaya Menurut Suku

No	Jenis Suku	Jumlah
1	Jawa	1050 Orang
2	Sunda	803 Orang
Jumlah		1853 Orang

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Rambah Jaya Tahun 2009

Tabel diatas menunjukkan bahwa penduduk Desa Rambah Jaya yang berasal dari suku jawa lebih banyak dari pada penduduk yang berasal dari suku sunda pada tahun 2009, dengan jumlah penduduk yang bersuku jawa sebanyak 1050 Orang, sedangkan penduduk yang bersuku sunda hanya berjumlah 803 Orang dari jumlah Penduduk Desa Rambah Jaya yang berjumlah sebanyak 1853 Orang.

Untuk mengetahui Klasifikasi penduduk Desa Rambah Jaya berdasarkan jenis kelamin dapat kita lihat pada table dibawa ini :

Table IV. 2 Klasifikasi Penduduk Desa Rambah Jaya Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	939 Orang
2	Perempuan	914 Orang
Jumlah		1853 Orang

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Rambah Jaya Tahun 2009

Dari table diatas dapat diketahui bahwa penduduk Desa Rambah Jaya yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari pada penduduk yang berjenis kelamin perempuan. Dimana jumlah penduduk Desa Rambah Jaya yang berjenis kelamin laki-laki 939 Orang, sementara Penduduk Desa Rambah Jaya yang berjenis kelamin perempuan Berjumlah 914 Orang dari jumlah keseluruhan yaitu 1853 jiwa.

Untuk mengetahui jumlah penduduk Desa Rambah Jaya Menurut umur, dapat dilihat pada table dibawah ini :

Table IV. 3 Klasifikasi penduduk Desa Rambah Jaya Berdasarkan Umur

No	Umur (Tahun)	Laki-laki	perempuan	Jumlah
1	0-5 Tahun	84	95	179
2	6-10 Tahun	90	107	197
3	11-20 Tahun	141	169	310
4	21-30 Tahun	107	109	216
5	31-40 Tahun	199	188	387
6	41-50 Tahun	182	179	361
7	50 Tahun keatas	111	92	203
Jumlah		914	939	1853

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Rambah Jaya Tahun 2009

Dari rician diatas menunjukkan bahwa penduduk Desa Rambah Jaya yang berumur 31 s/d 50 tahun merupakan penduduk yang paling banyak dengan jumlah 748 orang, sedangkan penduduk Desa Rambah Jaya yang paling sedikit yaitu

berkisar dari umur 0 s/d 10 tahun dengan jumlah 376 orang. Dengan demikian bahwa generasi muda yang akan meneruskan perjalanan Pemerintahan Desa di Desa Rambah Jaya lebih sedikit dibandingkan generasi yang sudah tua.

b. Pendidikan

Penduduk yang ada di Desa Rambah Jaya pada umumnya dapat membaca dan menulis, hal ini dapat di tunjukkan dengan pengakuan pemerintah Kecamatan pada Tahun 2008 bahwa penduduk Desa Rambah Jaya Bebas Buta Huruf, meski demikian penduduk desa Rambah Jaya Secara Formal ada yang tamat Sekolah Dasar (SD) dan ada juga yang sampai pada tingkat perguruan tinggi.

Untuk mengetahui rincian tentang tingkat pendidikan penduduk Desa Rambah Jaya dapat di lihat dari table berikut :

Table IV. 4 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Rambah Jaya

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Tidak Sekolah	71 Orang	3,83 %
2	Tidak Tamat Sekolah Dasar	379 Orang	20,45 %
3	Tamat Sekolah Dasar (SD)	627 Orang	33,84 %
4	SLTP/Sederajat	616 Orang	33,24 %
5	SLTA/Sedrajat	132 Orang	7,12 %
6	Diploma 1 (D-1)	6 Orang	0,32 %
7	Diploma 2 (D- 2)	9 Orang	0,48 %
8	Diploma 3 (D-3)	5 Orang	0,27 %
9	Sarjana (S-1)	8 Orang	0,4 %
jumlah		1853	100 %

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Rambah Jaya Tahun 2009

Dari table diatas dapat diketahui bahwa penduduk Desa Rambah Jaya yang Hanya menamatkan pendidikan di sekolah dasar (SD) cukup banyak, ini

menunjukkan tingkat pendidikan penduduk Desa Rambah Jaya Masih rendah, walaupun ada diantara mereka yang berpendidikan sampai perguruan tinggi.

Untuk menyelenggarakan pendidikan formal, di Desa Rambah Jaya telah tersedia lembaga pendidikan mulai dari, Pendidikan Usia Dini (PAUD), Taman Kakak-kanak (TK), Taman Pendidikan Alqur'an (TPA), Sekolah Dasar (SD)

Untuk mengetahui lembaga pendidikan formal yang ada di Desa Rambah Jaya dapat dilihat pada table berikut :

Table IV. 4 fasilitas Pendidikan Penduduk Desa Rambah Jaya

No	Jenis Pendidikan	Negeri	Swasta	Jumlah
1	PAUD		1	1
2	TK	-	1	1
3	TPA	-	6	6
4	SD	2	-	2
5	SLTP		-	-
6	SLTA	-	-	-
7	Perguruan Tinggi		-	
Jumlah		2	8	10

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Rambah Jaya Tahun 2009

Dari table diatas dapat dilihat bahwa fasilitas pendidikan formal Desa Rambah Jaya Terdapat 10 lembaga pendidikan, yaitu 1 Lembaga Pendidikan PAUD, 1 lembaga pendidikan TK, 6 Lembaga Pendidikan TPA, 2 lembaga pendidikan SD, sedangkan untuk SLTP, SLTA dan Perguruan tinggi masih belum ada di Desa Rambah Raja.

C. Mata Pencaharian

Secara umum kita lihat bahwa penduduk yang tinggal di Desa Rambah Jaya mayoritas mata pencaharian sebagai petani, sedangkan mata pencaharian yang lainnya diantaranya, Pegawai Swasta, PNS, Wirasuaasta, dan buruh.

Untuk mengetahui mata pencaharian masyarakat Desa Rambah Jaya, dapat kita lihat dari table berikut ini:

Tabel IV. 6 Mata Pencaharian Penduduk Desa Rambah Jaya

No	Mata Pencaharian	Jumlah	persentase
1	Petani	1427 Orang	77, 01 %
2	Pegawai Swasta	73 Orang	3,94 %
3	PNS	7 Orang	0,38 %
4	Wirasuwasta	206 Orang	11,11 %
5	Buruh	140 Orang	7,56 %
Jumlah		1853 Orang	100 %

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Rambah Jaya Tahun 2009

Tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk desa Rambah Jaya bermata pencaharian sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Penduduk Desa Rambah Jaya bekerja sebagai petani sawit dan petani karet, Penduduk desa Rambah Jaya yang Bekerja sebagai pegawai Negeri sebanyak 7 Orang, namun banyak generasi muda Penduduk Desa Rambah Jaya yang melanjutkan Pendidikan ke kepeguruan Tinggi yang ada di kabupaten Rokan Hulu, dan Perguruan Tinggi yang ada di Provinsi Riau

f. Agama

Desa Rambah Jaya Kecamatan bangun Purba yang berpenduduk 1853 jiwa yang terdiri dari 539 Kepala Keluarga (KK) dari berbagai suku, dalam kehidupan bermasyarakat berjalan dengan baik, masyarakat suku jawa dan sunda pada umumnya beragama islam, dan mayoritas penduduk Desa Rambah Jaya beragama Islam, tetapi ada beberapa Kepala Keluarga (KK) yang Beragama Kristen.

Untuk mengetahui agama masyarakat Desa Rambah Jaya, dapat kita lihat dari table berikut ini:

Tabel IV. 7 AgamaPenduduk Desa Rambah Jaya

No	Mata Pencapaian	Jumlah	persentase
1	Islam	1841 Orang	99,35 %
2	Khatolik	12 Orang	0,65 %
3	Protestan	-	-
4	Bhuda	-	-
5	Hindu	-	-
Jumlah		1853 Orang	100 %

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Rambah Jaya Tahun 2009

Dari Tabel diatas dapat kita lihat bahwa, penduduk desa Rambah Jaya mayoritas memeluk Agama Islam dengan Jumlah 1841 Orang. Sementara itu yang memeluk agama Khatolik Sebanyak 12 orang.

Di Desa Rambah Jaya ada rumah ibadah bagi orang Islam yaiti, masjid dan mushala, dan ada pula Gereja untuk orang Kristen dengan jumlah sesuai dengan keadaan penduduk masyarakat Desa Rambah Jaya. adapun untuk mengetahui rumah ibadah dapat kita lihat table di bawah ini:

Tabel IV. 8 Rumah Ibadah Di Desa Rambah Jaya

No	Mata Pencapaian	Jumlah
1	Masjid	2 Buah
2	Mushola	8 Buah
3	Gereja	1 Buah
4	Wihara	-
5	Pura	-
jumlah		11 Buah

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Rambah Jaya Tahun 2009

Table diatas memberi penjelasan bahwa rumah ibadah yang ada di Desa Rambah Jaya berjumlah 11 buah, yang terdiri dari 2 buah masjid, 8 buah Mushlah dan 1 buah Gereja

C. Sejarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

1. Berdirinya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rambah Jaya

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahdaerah yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang sekarang sudah diubah lagi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, peraturan tersebut menjelaskan tentang institusi lokal yang ada di Desa yaitu BPD yang berperan sebagai mitra Pemerintahan Desa, untuk mewujudkan Pemerintahan Desa yang demokratis.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Rambah Jaya dibentuk akibat dikeluarkannya peraturan Daerah (Perda) kabupaten Rokan Hulu Tentang pedoman pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), berdasarkan PERDA kabupaten Rokan Hulu N0 41 Tahun 2002 tentang pembentukan Badan Permusyawaratan Desa. Maka Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui Camat Bangun Purba agar dapat membantu Badan Permusyawaratan Desa di Desa tersebut, sejalan dengan itu Kepala Desa Rambah Jaya menyelenggarakan rapat desa yang membahas tentang pembentukan BPD, sehingga dibentuk panitia pembentuk BPD desa Rambah Jaya.

Pemilihan anggota BPD diikuti oleh seluruh masyarakat desa Rambah Jaya yang terdiri dari 3 dusun dengan jumlah kursi yang direbutkan 5 kursi karena jumlah penduduk desa Rambah Jaya berjumlah 1853 orang.

Pada tanggal 13 Januari 2004 Bupati Rokan Hulu membuat surat Keputusan Nomor: Kpts.140/ PEM-BPD/ 01/ 2004 tentang pengesahan Pimpinan

dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, berdasarkan keputusan Bupati Rokan Hulu tersebut, maka BPD Desa Rambah Jaya resmi menjadi lembaga yang kuat secara hukum dan fakta, karena sesuai dengan perundang-undang yang berlaku.

D. Kedudukan, Tugas Wewenang dan Fungsi BPD

1. Kedudukan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai kedudukan sebagai berikut :

- a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai Badan Perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi yang berdasarkan Pancasila
- b. Badan permusyawaratan desa (BPD) berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja dari Pemerintahan Desa.
- c. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

2. Tugas dan Wewenang

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
3. Membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
4. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
5. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
6. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa

7. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat

8. Menyusun tata tertib BPD

3. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung, menggali dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

E. Struktur Organisasi BPD

Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Rambah Jaya dapat dilihat pada uraian di bawah ini :

Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rambah Jaya terdiri dari

- | | |
|-----------------|-----------|
| I. Ketua | : Sukardi |
| II. wakil Ketua | : Pasturi |
| III. Anggota | : Amri |
| IV. Anggota | : Sriyono |
| V. Anggota | : Giarti |

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Sebelum menguraikan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka akan dijelaskan identitas responden terlebih dahulu. Adapun tujuan dari uraian identitas responden ini adalah untuk mengetahui secara jelas background responden, sehingga hasil dari jawaban responden tersebut dapat dihubungkan dengan tujuan penelitian ini. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dari hasil angket yang disebarkan maupun wawancara langsung dapat diklasifikasikan mengenai keadaan responden yang menjadi responden dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Desa berjumlah 5 orang.
2. Pemerintah Desa berjumlah 8 orang.
3. Masyarakat Desa Rambah Jaya berjumlah 82 orang.

Berikut klasifikasi responden penelitian yang dimaksud tersebut:

Tabel V.1. Kalsifikasi responden penelitian.

NO	RESPONDEN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Badan Permusyawaratan Desa	5	5,26
2	Pemerintahan Desa	8	8,42
3	Masyarakat Desa	82	86,32
JUMLAH		95 ORANG	100%

Sumbe : Penelitian Lapangan 2009

1. Kelompok Umur

Kematangan pemikiran dan emosi seseorang diwarnai oleh usia, biasanya dengan

bertambah usia seseorang semakin banyak pula pengalaman yang dapat dijadikan pelajaran dan perbandingan. Bila dikelompokkan komposisi umur responden dari hasil penyampaian wawancara dan angket maka kelompok umur responden adalah seperti pada tabel V.2 ini.

Tabel V.1
Jumlah Responden Kelompok Umur

No	Kelompok Umur	Jumlah	Persentase
1	21 – 30 tahun	14	14,73 %
2	31 – 40 tahun	26	27,36 %
3	41 – 50 tahun	28	29,47 %
4	51 keatas	27	28,42 %
	Jumlah	95	100 %

Sumber : Penelitian Lapangan 2009

Dari Tabel V.2 diatas dapat kita lihat bahwa usia responden yang berusia 21 – 30 tahun berjumlah 14 orang atau 14,73 %, berusia 31 – 40 tahun berjumlah 26 orang atau 27,36 %, berusia 41 – 50 tahun berjumlah 28 orang atau 29,47 %, kemudian yang berusia 51 keatas berjumlah 27 orang atau 28,42 %.

Dengan demikian usia responden rata – rata sudah dewasa karena diatas usia 41 – 50 tahun dan 51 tahun keatas sama banyak dan pemikiran sudah stabil, tidak mengedepankan emosi dalam kehidupan dan telah matang dalam berpikir

secara jernih. Sehingga dengan kematangan usia ini tidak sembarangan dalam mengambil suatu kebijakan atau keputusan.

2. Tingkat Pendidikan Responden

Tingkat pendidikan sangat memengaruhi pola pemikiran seseorang dalam mengharungi kehidupan. Umumnya orang yang berpendidikan tinggi akan sangat cermat dalam mengambil keputusan. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi inilah manusia juga dapat memiliki kekuasaan. Untuk melihat tingkat pendidikan yang telah di raih oleh responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel V.3 dibawah ini :

Tabel V.3
Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Tamatan SD	44	46,31 %
2	Sekolah Menengah Pertama	25	26,31 %
3	Sekolah menengah Umum	23	24,21 %
4	Perguruan Tinggi	3	3,15 %
	Jumlah	95	100 %

Sumber : Penelitian Lapangan 2009

Dari tabel V.3 diatas terlihat bahwa tingkat pendidikan yang telah dicapai oleh responden yang tamat pada tingkat Sekolah Dasar (SD) adalah 44 Orang atau 46,31 %, yang menyelesaikan Tamatan Sekolah Menengah Pertama berjumlah 25 Orang atau 26,31 %, dan yang telah menyelesaikan Sekolah menengah Umum berjumlah 23 Orang atau 24,21 % dari jumlah responden.

Untuk responden yang meraih pendidikan sampai akademi dan perguruan tinggi berjumlah 3 Orang atau 3,15 %.

Didesa ini Tingkat Pendidikan perguruan Tinggi Sangat minim, Dikarena kan kurang nya biaya, sudah tamat SMU saja sudah tinggi dimata masyarakat desa ini. Dengan demikian tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini lebih banyak tingkat tamatan Sekolah Dasar, sedangkan paling terendah Tingkat perguruan Tinggi atau di Akademi.

Sehingga bila dilihat pada tabel V.3 diatas tingkat pendidikan perkuliahan kurang baik sedangkan untuk tingkat pendidikan Sekolah Menengah Umum dan sekolah menengah pertama Sudah Cukup Baik.

B. Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Dari Variabel Penelitian

a. Responden Badan Permusyawaratan Desa Rambah Jaya

1. Pemahaman Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Rambah Jaya.

Tabel V.4. Jawaban responden tentang paham atau tidak akan fungsinya.

NO	JAWABAN RESPONDEN	FREKUENSI	PERSENTASE
1	Paham	5	100 %
2	Kurang Paham	-	-
3	Tidak Paham	-	-
JUMLAH		5 ORANG	100 %

Sumber: Penelitian Lapangan 2009

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa Rambah Jaya telah yang berjumlah 5 orang (100 %) mengetahui dan memahami akan fungsi dan wewenangnya sebagai parlemen desa. Hal ini disebabkan cukup tingginya kualitas sumber daya manusia anggota parlemen desa

tersebut sehingga mudah dan cepat memahami peranan yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

2. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Rambah Jaya.

Tabel V.5. Jawaban responden tentang sudah terlaksana atau tidak fungsinya.

NO	JAWABAN RESPONDEN	FREKUENSI	PERSENTASE
1	Ya	1	20 %
2	Sebagian	4	80 %
3	Tidak	-	-
JUMLAH		5 ORANG	100%

Sumber: Penelitian Lapangan 2009

Menurut jawaban responden dari 5 responden anggota BPD diatas dapat diketahui 1 responden atau 20 % sebagian kecil anggota BPD mengatakan sudah melaksanakan fungsinya sebagai legislatif desa meskipun belum optimal, sedangkan 4 responden atau 80 % memberikan tanggapan sebagian melaksanakan fungsi DPB, hal ini dikarena keberadaan institusi yang masih dianggap baru didalam sistem pemerintahan desa ini sehingga kebijakan atau kegiatan yang telah dilaksanakan dianggap sudah *significant* terealisasi. sebagian kecil yang terialisasi sehingga terkesan tidak sebanding dengan besarnya fungsi yang harus dilaksanakan.

Jadi persentase BPD yang sebagian menjalankan fungsinya Desa Rambah Jaya 80 % (tidak optimal)

3. Kemampuan Dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Rambah Jaya

Tabel V.6. Jawaban responden tentang mampu atau tidak dalam melaksanakan fungsi.

NO	JAWABAN RESPONDEN	FREKUENSI	PERSENTASE
1	Mampu	4	69.23
2	Kurang Mampu	1	30.77
3	Tidak Mampu	-	-
JUMLAH		5 ORANG	100%

Sumber: Penelitian Lapangan 2009

Dari tabel V.6 menunjukkan bahwa responden yang memberikan tanggapan mengenai BPD mampu atau tidak untuk menjalankan fungsinya termasuk "mampu" yakni sebanyak 4 orang responden atau 80 %, sedangkan yang memberikan tanggapan kurang mampu 1 orang responden atau 20 %.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa Rambah Jaya mampu melaksanakan fungsinya dengan baik meskipun realisasinya belum optimal. Berbagai hambatan dimana terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana membuat pelaksanaan kinerja tidak maksimal sehingga sebagian saja yang mampu terialisasikan.

4. Kebutuhan Akan Kantor Sekretariatan Badan Permusyawaratan Desa Rambah Jaya

Tabel IV.8. Jawaban responden tentang butuh atau tidaknya kantor sekretariatan.

NO	JAWABAN RESPONDEN	FREKUENSI	PERSENTASE
1	Butuh	5	100 %
2	Kurang Butuh	-	-
3	Tidak Butuh	-	-
JUMLAH		5 ORANG	100%

Sumber: Penelitian Lapangan 2009

Berdasarkan table di atas dapat diketahui bahwa semua responden (100 %) anggota BPD mengatakan butuh kantor sekretariat untuk menunjang kinerja BPD.

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa BPD dalam melaksanakan fungsinya sangat memerlukan kantor kerja sebagai tempat membicarakan dan merumuskan kebijakan yang akan dibuat dan dilaksanakan. Selama ini menurut anggota BPD Bpk. Sriono (wawancara 2 nopember 2009) pelaksanaan rapat atau musyawarah selalu dilaksanakan di rumahnya dan kadang-kadang di rumah anggota BPD lainnya sehingga pelaksanaan rapat kurang efektif dan efisien, karena sebelum mengadakan rapat mereka harus terlebih dahulu menentukan tempatnya.

5. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Rambah Jaya

Tabel V.8. Jawaban responden tentang cukup tersedia atau tidaknya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan fungsi.

NO	JAWABAN RESPONDEN	FREKUENSI	PERSENTASE
1	Ya	-	-
2	Kurang	1	15.38
3	Tidak	4	84.62
JUMLAH		5 ORANG	100%

Sumber: Penelitian Lapangan 2006

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 5 responden terdapat 1 orang 15,38 responden yang “kurang” tersedianya sarana dan prasarana, sedangkan 4 orang 84,62 responden “tidak” tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan fungsi BPD

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana belum mencukupi sehingga menjadi hambatan didalam pelaksanaan kinerja Badan Permusyawaratan Desa tersebut, seperti kantor sekretariatan. Meskipun demikian, sebagian fasilitas lainnya, seperti komputer, preiter masih belum ada sehingga proses administrasi tidak dapat berjalan dengan baik.

6. Pengaruh Sekretariatan Bagi Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Rambah Jaya.

Tabel V.9. Jawaban responden tentang berpengaruh atau tidaknya sarana dan prasarana pendukung bagi pelaksanaan fungsi.

NO	JAWABAN RESPONDEN	FREKUENSI	PERSENTASE
1	Ya	2	40 %
2	Kurang	2	40 %
3	Tidak	1	20 %
JUMLAH		5 ORANG	100%

Sumber: Penelitian Lapangan 2009

Dari tabel V. 9 diatas dapat diketahui bahwa dari 5 responden terdapat 2 orang 40 % responden yang “ya “ berpengaruh terhadap sarana dan prasarana pendukung bagi pelaksanaan fungsi BPD. Sedanagkan 2 orang 40 % “kurang” berpengaruh terhadap sarana dan prasarana, dan 1 orang 20 % responden “tidak” berpengaruh terhadap sarana dan prasarana pendukung fungsi BPD.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa meskipun sarana dan prasarana kurang memadai seperti kantor sekretariatan akan tetapi dengan semangat dan tanggungjawab yang besar sebagai institusi perwakilan masyarakat,

BPD tetap dan dapat menjalankan fungsinya meskipun belum maksimal (sebagian kecil).

7. Perumusan Peraturan Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa Rambah Jaya

Tabel V.10 Jawaban responden tentang pernah atau tidaknya merumuskan peraturan desa

NO	JAWABAN RESPONDEN	FREKUENSI	PERSENTASE
1	Ya	3	60 %
2	Ragu-Ragu	1	20 %
3	Tidak	1	20 %
JUMLAH		5 ORANG	100%

Sumber: Penelitian Lapangan 200

Dari tabel V.10 diatas dapat diketahui bahwa dari 5 responden terdapat 3 orang 60 % responden yang “ya “ merumuskan peraturan desa. Sedangkan 1 orang 20 % “Ragu-rau” dalam merumuskan peraturan desa, dan 1 orang 20 % responden “tidak” merumuskan perauran desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa BPD telah mengeluarkan peraturan desa (Perdes). Akan tetapi jika dibandingkan dengan fungsi dan wewenangnya sebagai institusi perwakilan masyarakat yang begitu besar, maka pelaksanaan fungsi tersebut baru terialisasi sebagian kecil saja. Sementara peraturan desa untuk mengayomi adat istiadat masyarakat desa yang merupakan hak asal usul atau yang menunjukkan identitas daerah tersebut belum terwujud.

8. Pemerintah Desa Meminta Pendapat (Pertimbangan) Kepada Badan Permusyawaratan Desa Rambah Jaya.

Tabel V.11. Jawaban responden tentang pernah atau tidaknya Pemerintah Desa meminta pendapat (pertimbangan)..

NO	JAWABAN RESPONDEN	FREKUENSI	PERSENTASE
1	Ya	2	40 %
2	Kadang-Kadang	3	60 %
3	Tidak	-	-
JUMLAH		5 ORANG	100%

Sumber: Penelitian Lapangan 2009

Dari tabel V.11 diatas dapat diketahui bahwa dari 5 orang responden, yaitu 2 orang 40 % responden “ya” Pemerintahan Desa meminta pendapat (Pertimbangan) kepada Badan Permusyawaratan Desa, sedangkan 3 orang 60% responden “kadang-kadang” Pemerintahan desa meminta pendapat (Pertimbangan) kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Sesuai dengan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa didalam melaksanakan roda pemerintahan, Pemerintah Desa jarang berkonsultasi atau meminta pertimbangan kepada BPD sebagai mitra kerjanya. Seharusnya Pemerintah Desa didalam setiap membuat dan mengambil kebijakan harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan BPD agar kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya penolakan dari masyarakat, karena BPD adalah lembaga penampung dan penyalur aspirasi masyarakat.

9. Kesesuaian Peraturan Desa Dengan Aspirasi Masyarakat Desa Rambah Jaya .

Tabel IV.12. Jawaban responden tentang sesuai atau tidaknya Peraturan Desa dengan aspirasi masyarakat.

NO	JAWABAN RESPONDEN	FREKUENSI	PERSENTASE
1	Ya	-	-
2	Kurang	2	40 %
3	Tidak	3	60 %
JUMLAH		5 ORANG	100%

Sumber: Penelitian Lapangan 2009

Dari tabel V.12. diatas dapat di ketahui bahwa dari 5 orang responden, yaitu 2 orang 40 % responden “kurang” kesesuaian peraturan Desa dengan aspirasi masyarakat Desa Rambah Jaya, dan 3 orang 60 % responden “tidak” kesesuaian peraturan Desa dengan aspirasi masyarakat Desa Rambah Jaya.

Dilihat dari tabel diatas dapat disimpulkan, BPD bersama Pemerintah Desa telah membuat peraturan desa tentang pengaturan administrasi dan pengelolaan keuangan desa. Peraturan desa ini dibuat dalam rangka memudahkan masyarakat didalam mengurus persyaratan administrasi seperti KTP di kantor desa serta menghindari penyimpangan didalam penggunaan keuangan desa. Peraturan Desa tersebut bukanlah berasal dari aspirasi masyarakat yang disampaikan, akan tetapi kebijakan tersebut adalah inisitif BPD agar administratif desa (pelayanan kepada masyarakat) berjalan dengan baik. Sementara itu, hak asal usul masyarakat yang merupakan aspirasi masyarakat belum diakomodir oleh BPD.

10. Kebutuhan Anggaran Bagi Badan Permusyawaratan Desa Rambah Jaya

Dalam Menjalankan Fungsinya.

Tabel V.13. Jawaban responden tentang butuh atau tidaknya anggaran dalam menjalankan fungsinya.

NO	JAWABAN RESPONDEN	FREKUENSI	PERSENTASE
1	Butuh	5	100
2	Kurang Butuh	-	-
3	Tidak Butuh	-	-
JUMLAH		5 ORANG	100%

Sumber: Penelitian Lapangan 2009

Berdasarkan table di atas dapat diketahui bahwa semua responden (100 %) anggota BPD mengatakan butuh anggaran dalam menjalankan fungsi badan Permusyawaratan Desa

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa Rambah Jaya sangat memerlukan anggaran operasional didalam melaksanakan fungsinya karena ketersediaan sarana dan prasarana belum mencukupi dan sangat minim sekali sehingga efektivitas dan efisiensi kerja belum terwujud.

11. Kecukupan Anggaran Bagi Badan Permusyawaratan Desa Rambah Jaya Dalam Menjalankan Fungsi

Tabel V.14. Jawaban responden tentang cukup atau tidaknya anggaran dalam menjalankan fungsinya.

NO	JAWABAN RESPONDEN	FREKUWENSI	PERSENTASE
1	Cukup	-	-
2	Kurang Cukup	2	40 %
3	Tidak Cukup	3	60 %
JUMLAH		5 ORANG	100%

Sumber: Penelitian Lapangan 2009

Berdasarkan table V.13. di atas dapat diketahui bahwa, 2 orang 40 % responden kurang cukup anggaran dalam menjalankan fungsinya, sedangkan 3 orang 60 % responden tidak cukup anggaran dalam menjalankan fungsinya

Sebagaimana diketahui bahwa BPD telah membuat Peraturan Desa tentang administrasi dan tata keuangan desa (APBDes). Artinya anggaran untuk operasional BPD telah tersedia. Akan tetapi berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa ketersediaan anggaran tersebut belum mencukupi didalam melaksanakan fungsinya. Namun demikian dengan anggaran yang ada BPD tetap melaksanakan kinerja dengan baik meskipun belum maksimal.

12. Dukungan Anggaran Bagi Badan Permusyawaratan Desa Rambah Jaya Dalam Menjalankan Fungsinya

Tabel V.15. Jawaban responden tentang sudah mendukung atau tidaknya anggaran yang ada untuk pelaksanaan fungsinya.

NO	JAWABAN RESPONDEN	FREKUENSI	PERSENTASE
1	Ya	1	20 %
2	Kurang	3	60 %
3	Tidak	1	20 %
JUMLAH		5 ORANG	100%

Sumber: Penelitian Lapangan 2009

Dari tabel V.15. diatas dapat di ketahui bahwa dari 5 orang responden, yaitu 1 orang 20 % responden “ya” sudah mendukung anggaran yang ada untuk pelaksanaan fungsinya.3 orang 60 % responden “kurang” mendukung anggaran yang ada untuk pelaksanaan fungsinya. Sedangkan 1 orang 20 % responden “tidak” mendukung anggaran yang ada untuk pelaksanaan fungsinya.

Berdasarkan tabel diatas disimpulkan bahwa dukungan anggaran sangat mempengaruhi pelaksanaan kinerja BPD. Dengan anggaran yang tersedia Badan

Permasyarakatan Desa Rambah Jaya masih mampu melaksanakan fungsinya meskipun belum maksimal. Sesungguhnya pelaksanaan fungsi secara maksimal akan terwujud jika didukung oleh anggaran yang memadai.

13. Pemahaman Badan Permusyawaratan Desa Akan Fungsi Pemerintah Desa Rambah Jaya.

Tabel V.16. Jawaban responden tentang mengerti atau tidaknya akan fungsi Pemerintah Desa

NO	JAWABAN RESPONDEN	FREKUENSI	PERSENTASE
1	Paham	5	100
2	Kurang Paham	-	-
3	Tidak Paham	-	-
JUMLAH		5 ORANG	100%

Sumber: Penelitian Lapangan 2009

Berdasarkan table V.16. di atas dapat diketahui bahwa semua responden (100 %) anggota BPD mengatakan mengerti akan Pemerintahan Desa

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa sudah mengerti dan memahami akan fungsi dan kewajiban Pemerintah Desa didalam melaksanakan roda pemerintahan di Desa Rambah Jaya. Kondisi tersebut memudahkan BPD untuk bertindak atau berbuat didalam melakukan pengawasan dan mitra kerja dengan Pemerintah Desa.

14. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Rambah Jaya.

Tabel V.17. Jawaban responden tentang pernah atau tidaknya melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa.

NO	JAWABAN RESPONDEN	FREKUENSI	PERSENTASE
1	Pernah	5	100
2	Kadang-Kadang	-	-
3	Tidak Pernah	-	-
JUMLAH		5 ORANG	100%

Sumber: Penelitian Lapangan 2009

Berdasarkan table V.17. di atas dapat diketahui bahwa semua responden (100 %) anggota BPD mengatakan pernah melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintahan Desa.

Berdasarkan pada tabel diatas bahwa Badan Permusyawaratan Desa telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dengan baik meskipun terkesan belum sepenuhnya akan tetapi hal tersebut terjadi karena sarana dan prasarana kurang mendukung.

15. Pelaksanaan Fungsi Oleh Pemerintah Desa Rambah Jaya .

Tabel V.18. Jawaban responden tentang terlaksana atau tidaknya fungsi atau kinerja Pemerintah Desa

NO	JAWABAN RESPONDEN	FREKUENSI	PERSENTASE
1	Ya	1	20 %
2	Kurang	3	30 %
3	Tidak	1	20 %
JUMLAH		5 ORANG	100%

Sumber: Penelitian Lapangan 2009

Dari tabel V.18. diatas dapat diketahui bahwa dari 5 orang responden, 1 orang 20 % responden mengatakan “ya” terlaksana fungsi atau kinerja Pemerintah Desa, 3 orang 60 % kurang terlaksana fungsi atau kinerja Pemerintah Desa,

sedangkan 1 orang 20 % responden tidak terlaksana fungsi atau kinerja Pemerintah Desa dengan baik.

Berdasarkan data tersebut bahwa Pemerintah Desa telah melaksanakan fungsi dan kinerjanya meskipun belum sepenuhnya (sebagian saja).

a . Responden Pemerintahan Desa Rambah Jaya

1. Pemerintah Desa Meminta Pertimbangan Kepada BPD.

Tabel V.19. Jawaban responden tentang pernah atau tidaknya meminta pendapat dan pertimbangan kepada Badan Permusyawaratan Desa

NO	JAWABAN RESPONDEN	FREKUENSI	PERSENTASE
1	Pernah	4	50 %
2	Kadang-Kadang	4	50 %
3	Tidak Pernah	-	-
JUMLAH		8 ORANG	100%

Sumber: Penelitian Lapangan 2009

Dari tabel V.19. diatas dapat bahwa dari 8 responden, 4 orang 50 % responden pemerintahan Desa pernah meminta pendapat atau pertimbangan kepada BPD, sedangkan 4 orang 50 % responden pemerintahan Desa kadang-kadang meminta pendapat kepada BPD.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa didalam menjalankan roda pemerintahan, Pemerintah Desa berkonsultasi terlebih dahulu kepada BPD agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik. Akan tetapi ada beberapa kebijakan yang dilaksanakan tanpa berkonsultasi dengan BPD.

2. Pemerintah Desa Mengundang Badan Permusyawaratan Desa Didalam Setiap Musyawarah Desa.

Tabel V.20. Jawaban responden tentang pernah atau tidaknya mengundang dalam setiap musyawarah desa Badan Permusyawaratan Desa.

NO	JAWABAN RESPONDEN	FREKUENSI	PERSENTASE
1	Pernah	4	50
2	Kadang-Kadang	4	50
3	Tidak Pernah	-	-
JUMLAH		8 ORANG	100%

Sumber: Penelitian Lapangan 2009

Dari tabel V.20. diatas bahwa dari 8 responden, 4 orang 50 % responden pernah mengundang Badan Permusyawaratan Desa didalam setiap musyawarah Desa, 4 orang 50 % responden kadang-kadang mengundang Badan Permusyawaratan Desa didalam setiap musyawarah Desa.

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa sedikit bersikap tertutup dimana tidak setiap mengadakan musyawarah desa BPD diundang, namun pada umumnya BPD tetap diikuti.

3. Pemerintah Desa Melibatkan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membahas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.

Tabel V.21. Jawaban responden tentang pernah atau tidaknya melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas APBDes.

NO	JAWABAN RESPONDEN	FREKUENSI	PERSENTASE
1	Pernah	8	100
2	Kadang-Kadang	-	-
3	Tidak Pernah	-	-
JUMLAH		8 ORANG	100%

Sumber: Penelitian Lapangan 2009

Berdasarkan table V.21. di atas dapat diketahui bahwa semua responden (100 %) Pemerintahan Desa melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas APBDes.

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan pemerintah desa telah melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

4. Pemerintah Desa diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.

Tabel V.22. jawaban responden tentang pernah atau tidaknya Badan Permusyawaratan Desa mengawasi dalam penggunaan APBDes

NO	JAWABAN RESPONDEN	FREKUENSI	PERSENTASE
1	Pernah	8	100
2	Kadang-Kadang	-	-
3	Tidak Pernah	-	-
JUMLAH		8 ORANG	100%

Sumber: Penelitian Lapangan 2009

Berdasarkan table V.22. di atas dapat diketahui bahwa semua responden (100 %) Pemerintahan Desa diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam penggunaan anggaran pendapatan dan belanja Desa.

Sesuai pada data tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa dengan segala fasilitas yang ada telah melaksanakan fungsi pengawasan anggaran terhadap pemerintah desa sebagai pengguna dan pengelola APBDes tersebut.

5. Pemerintah Desa Melaporkan Pertanggungjawaban Kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Tabel V.23. Jawaban responden tentang pernah atau tidaknya melaporkan pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa.

NO	JAWABAN RESPONDEN	FREKUENSI	PERSENTASE
1	Pernah	8	100
2	Kadang-Kadang	-	-
3	Tidak Pernah	-	-
JUMLAH		8 ORANG	100%

Sumber: Penelitian Lapangan 2009

Berdasarkan table V.23. di atas dapat diketahui bahwa semua responden (100 %) Pemerintahan Desa melaporkan pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 bahwa laporan pertanggungjawaban (LPJ) Pemerintah Desa disampaikan kepada bupati melalui camat satu kali dalam setahun yang kemudian laporan keterangannya disampaikan dalam musyawarah BPD satu kali dalam setahun. Berdasarkan tabel diatas Pemerintah Desa telah menyampaikan laporan keterangan Laporan Pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa.

6. Kebutuhan Akan Peraturan Desa.

Tabel V.24. Jawaban responden tentang perlu atau tidaknya Peraturan Desa

NO	JAWABAN RESPONDEN	FREKUENSI	PERSENTASE
1	Perlu	8	100
2	Kurang Perlu	-	-
3	Tidak Perlu	-	-
JUMLAH		8 ORANG	100%

Sumber: Penelitian Lapangan 2009

Berdasarkan table V.24. di atas dapat diketahui bahwa dari 8 orang responden, semua responden (100 %) perlu peraturan Desa

Berdasarkan tabel tersebut disimpulkan bahwa Pemerintah Desa sangat membutuhkan peraturan desa sebagai acuan didalam menjalankan roda pemerintahan agar tidak terjadi penyimpangan.

c. Responden Masyarakat Desa Rambah Jaya

1. Badan Permusyawaratan Desa Membuat Kegiatan Yang Menumbuh Kreativitas Masyarakat Desa Rambah Jaya .

Tabel V.25. Jawaban responden tentang pernah atau tidaknya BPD membuat kegiatan yang menumbuhkan kreativitas masyarakat Desa Rambah Jaya.

NO	JAWABAN RESPONDEN	FREKUENSI	PERSENTASE
1	Pernah	16	19,51 %
2	Kadang-Kadang	21	25,60 %
3	Tidak Pernah	45	54,87 %
JUMLAH		82 ORANG	100%

Sumber: Penelitian Lapangan 2009

Dari tabel V.25. diatas bahwa dari 82 orang responden, 16 orang 19,51 % responden Badan Permusyawara Desa pernah membuat kegiatan yang menumbuh kreativitas masyarakat Desa Rambah Jaya, 21 orang 25,60 % Badan Permusyawara Desa Kadang-kadang membuat kegiatan yang menumbuh kreativitas masyarakat Desa Rambah Jaya, sedangkan 45 orang 54,87 % responden “tidak pernah” Badan Permusyawara Desa membuat kegiatan yang menumbuh kreativitas masyarakat Desa Rambah Jaya

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa BPD belum melakukan atau membuat kegiatan yang menumbuhkan kreativitas masyarakat dimana

diharapkan muncul ide dan gagasan untuk mengembangkan daerah tersebut. Hal ini terjadi karena BPD adalah institusi yang baru pada sistem Pemerintahan Desa sehingga proses kinerja membutuhkan adaptasi yang sedikit lama disebabkan belum berpengalaman (wawancara dengan ketua BPD tanggal 7 Nopember 2009). Akan tetapi secara tidak langsung atau tidak sistematis BPD pernah mengadakan kegiatan untuk menumbuhkan kreativitas masyarakat seperti ikut andil didalam kegiatan masyarakat itu sendiri seperti memberikan bantuan moril, tenaga dan materil

2. Badan Permusyawaratan Desa Menampung Aspirasi Masyarakat Desa Rambah Jaya.

Tabel V.26. Jawaban responden tentang pernah atau tidaknya BPD dialog untuk menampung aspirasi.

NO	JAWABAN RESPONDEN	FREKUENSI	PERSENTASE
1	Pernah	47	57,31 %
2	Kadang-Kadang	22	26,82 %
3	Tidak Pernah	13	15,85 %
JUMLAH		82 ORANG	100%

Sumber: Penelitian Lapangan 2009

Dari tabel V.26. diatas bahwa dari 82 orang responden dapat diketahui, 47 orang 57,31% responden menjawab “pernah” BPD menampung aspirasi masyarakat Desa Rambah Jaya, 22 orang 26,82 % responden menjawab “kadang-kadang” BPD menampung aspirasi masyarakat Desa Rambah Jaya, sedangkan 13 orang 15,85 % responden menjawab “tidak pernah” BPD menampung aspirasi masyarakat Desa Rambah Jaya.

Berdasarkan pada tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa Rambah Jaya pernah mengadakan dialog dengan

masyarakat dalam rangka menampung aspirasi masyarakat. Akan tetapi hal tersebut dilakukan tidak secara formal dan sistematis, sehingga sebagian masyarakat tidak mengetahui bahwa lembaga tersebut telah melaksanakan fungsinya sebagai institusi perwakilan masyarakat.

3. Badan Permusyawaratan Desa Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Rambah Jaya.

Tabel V.27. Jawaban responden tentang pernah atau tidaknya Badan Permusyawaratan Desa menyalurkan aspirasi kepada Pemerintah Desa

NO	JAWABAN RESPONDEN	FREKUENSI	PERSENTASE
1	Pernah	16	19,51 %
2	Kadang-Kadang	27	32,92 %
3	Tidak Pernah	39	47,56 %
JUMLAH		82 ORANG	100%

Sumber: Penelitian Lapangan 2009

Dari tabel V.27. diatas bahwa dari 82 orang responden dapat diketahui, 16 orang 19,51 % Badan Permusyawaratan Desa menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Rambah Jaya, 27 orang 32,92 % responden kadang-kadang Badan Permusyawaratan Desa menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Rambah Jaya, sedangkan 39 orang 47,56 % responden Badan Permusyawaratan Desa “tidak pernah “menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Rambah Jaya.

Kemudian berdasarkan wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat yaitu Bapak Topan (wawancara tanggal 7 Desember 2009) disebutkan bahwa masyarakat sering mengadu atau menyampaikan keluhan, saran dan pendapat kepada Badan Permusyawaratan Desa yang kemudian beberapa diantaranya memang ditanggapi dan disalurkan. Berdasarkan tabel dan wawancara tersebut diketahui bahwa sesungguhnya masyarakat selalu memberikan masukan

kepada BPD, akan tetapi aspirasi tersebut belum terakomodir atau tersalurkan seluruhnya.

4. Badan Permusyawaratan Desa Mengajak Masyarakat Desa Rambah Jaya Berpartisipasi Dalam Penyelesaian Masalah Desa.

Tabel V.28. Jawaban responden tentang pernah atau tidaknya Badan Permusyawaratan Desa mengajak berpartisipasi dalam penyelesaian masalah desa.

NO	JAWABAN RESPONDEN	FREKUENSI	PERSENTASE
1	Pernah	37	45,12 %
2	Kadang-Kadang	28	34,14 %
3	Tidak Pernah	18	21,95 %
JUMLAH		82 ORANG	100 %

Sumber: Penelitian Lapangan 2009

Dari tabel V.30. diatas bahwa dari 82 orang reponden dapat diketahui, 37 orang 45,12 % responden mengatakan pernah Badan Permusyawaratan Desa mengajak masyarakat Desa Rambah Jaya berpartisipasi dalam penyelesaian masalah desa, 28 orang 34,14 responden kadang-kadang Badan Permusyawaratan Desa mengajak masyarakat Desa Rambah Jaya berpartisipasi dalam penyelesaian masalah desa, sedangkan 18 orang 21,95 % responden menyatakan “tidak pernah” Badan Permusyawaratan Desa mengajak masyarakat Desa Rambah Jaya berpartisipasi dalam penyelesaian masalah desa,

Sesuai dengan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa BPD dalam menyelesaikan masalah desa pernah mengajak masyarakat bepartisipasi dalam penyelesaian tersebut. Akan tetapi hal tersebut baru dilakukan setelah BPD tidak dapat menyelesaikannya sendiri, sehingga terkesan meminta dan menyampaikan

keluhan tersebut kepada masyarakat karena sudah terjepit (tidak sanggup menyelesaikannya sendiri).

5. Masyarakat Memberikan Saran Kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Tabel V.29. Jawaban responden tentang aktif atau tidaknya memberikan saran kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam mewujudkan Pemerintahan Desa yang baik.

NO	JAWABAN RESPONDEN	FREKUWENSI	PERSENTASE
1	Pernah	49	59,75 %
2	Kadang-Kadang	20	24,39 %
3	Tidak Pernah	13	15,85 %
JUMLAH		82 ORANG	100 %

Sumber: Penelitian Lapangan 2009

Dari tabel V.29 diatas bahwa dari 82 orang responden, menunjukkan 49 orang 59,75 % responden menjawab “pernah” masyarakat memberikan saran kepada Badan Permusyawaratan Desa, 20 orang 24,39 responden % menjawab “kadang-kadang” masyarakat memberikan saran kepada Badan Permusyawaratan Desa, sedangkan 13 orang 15,85 % % “tidak pernah” masyarakat memberikan saran kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat aktif memberikan masukan kepada Badan Permusyawaratan Desa, baik dilakukan secara individu maupun atas nama per dusun. Masyarakat memberikan saran kepada Badan Permusyawaratan Desa agar aspirasi masyarakat di perhatikan.

6. Masyarakat Mengevaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Rambah Jaya

Tabel V.30. Jawaban responden tentang pernah atau tidaknya mengevaluasi kinerja Badan Permusyawaratan Desa.

NO	JAWABAN RESPONDEN	FREKUWENSI	PERSENTASE
1	Pernah	15	18,29 %
2	Kadang-Kadang	27	32,92 %
3	Tidak Pernah	39	47,56 %
JUMLAH		82 ORANG	100 %

Sumber: Penelitian Lapangan 2009

Dari tabel V.30. diatas bahwa dari 82 orang responden dapat diketahui, 15 orang 18,29 % responden menjawab “pernah” mengevaluasi kinerja Badan Permasyarakatan Desa. 27 orang 32,92 % responden menjawab “kadang-kadang” mengevaluasi kinerja Badan Permasyarakatan Desa. Sedangkan 39 orang 47,56 % responden menjawab “tidak pernah” mengevaluasi kinerja Badan Permasyarakatan Desa.

Berdasarkan tabel dan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat tidak pernah melakukan evaluasi terhadap kinerja BPD secara sistematis, sehingga terkesan tidak ada. Padahal sebagian kecil masyarakat tetap melakukan evaluasi terhadap kinerja dengan mengkritisi anggota BPD yang berasal dari Dusunnya masing-masing.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mewujudkan otonomi Desa Rambah Jaya Kecamatan Bangun Purba, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peranan Badan Permusyawaratan Desa Rambah Jaya.

- a. Badan Permusyawaratan Desa Rambah Jaya sebagai institusi baru didalam sistem pemerintahan desa sekarang ini, telah melaksanakan fungsinya dengan baik meskipun belum maksimal karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung.
- b. Belum tersosialisasi sepenuhnya akan perubahan sistem pemerintahan desa tentang hak, kewajiban dan kewenangan yang dimiliki oleh unsur pemerintahan desa dari UU No. 22 Tahun 1999 kepada UU No. 32 Tahun 2004 sehingga masyarakat menilai peran institusi perwakilannya kurang berjalan dengan baik seperti pada permasalahan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa.

2. Fungsi Legislasi

- a. Badan Permusyawaratan Desa Rambah Jaya terbentuk pada tahun 2004 hingga 2006 (sekarang) hanya mengeluarkan satu Peraturan Desa yaitu tentang pengaturan administrasi dan tata pengelolaan keuangan desa. Artinya pelaksanaan fungsi sebagai parlemen desa terkesan tidak *significant* jika dibandingkan dengan besarnya fungsi institusi tersebut.

- b. Badan Permusyawaratan Desa jarang melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga pengayoman terhadap nilai-nilai adat istiadat masyarakat desa terabaikan (belum ada peraturan desa yang mengayomi adat istiadat).

3. Fungsi Anggaran.

- a. Badan Permusyawaratan Desa Rambah Jaya telah membuat dan merumuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa bersama-sama Pemerintah Desa dan ditetapkan dengan peraturan desa, meskipun anggaran tersebut masih sebagian besar berasal dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi (APBD) dan Pemerintah Kabupaten (APBD).
- b. Desa Rambah Jaya belum mempunyai Badan Usaha Milik desa (BUMDes) sehingga penghasilan atau pendapatan desa tersebut hanya berasal dari sumbangan masyarakat, gotong royong dan pendapatan lain yang sah.

4. Fungsi Pengawasan.

- a. Badan Permusyawaratan Desa Rambah Jaya belum sepenuhnya menampung aspirasi dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Hal tersebut terlihat masukan berupa saran pendapat dan kritikan kepada pemerintah desa jarang diakomodir dan disalurkan.
- b. Badan Permusyawaratan Desa Rambah Jaya dengan segala keterbatasan fasilitas pendukungnya tetap bersemangat dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa meskipun terkesan tertutup.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian lapangan, mengolah dan menganalisa data serta menyimpulkan, ada beberapa hal yang perlu penulis sampaikan yakni:

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu diharapkan secepatnya membuat dan menerapkan Peraturan Daerah pengganti tentang perubahan sistem pemerintahan desa dari bentuk aturan yang mengacu kepada UU No. 22 Tahun 1999 dan PP. No. 76 Tahun 2001 kepada UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 72 Tahun 2005 dan mensosialisasikannya kepada masyarakat desa.

2. Kepada Badan Permusyawaratan Desa Rambah Jaya.

Badan Permusyawaratan Desa diharapkan tetap konsisten menjalankan tugas atau fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 41 Tahun 2002 terutama yang menyangkut hak asal usul dan adat istiadat masyarakat desa sehingga dirasakan adanya penghargaan terhadap nilai-nilai dan identitas daerah tersebut.

3. Kepada Pemerintah Desa Rambah Jaya.

Kepala Desa diharapkan tetap menjalankan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bersipat terbuka (kerja sama) dalam menjalankan roda pemerintahan kepada Badan Permusyawaratan Desa dan Masyarakat Desa Rambah Jaya.

4. Kepada Masyarakat Desa Rambah Jaya.

Masyarakat Desa Rambah Jaya diharapkan tetap proaktif didalam mengawasi Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam rangka meningkatkan pembangunan di Desa Rambah Jaya.

DAFTAR PUSTAKA

Faisal Sanafiah, *Format - Format Penelitian Sosial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2003.

Heri Zulfan dkk, *Parlemen Desa; Membangun Demokrasi Dari Bawah*, UNRI

Ismawan Indra, *Ranjau-Ranjau Otonomi Daerah*, Pondok Edukasi, Solo: 2002

Lapera Tim, *Otonomi versi Negara; dibawah bayang-bayang otoriterisme*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2000.

Manan Bagir, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta: 2001.

Purwoko Bambang Dkk, *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2003.

Santoso Gempur, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Prestasi Pustaka, Jakarta: 2005

Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung: 2003.

Widjaja Haw, *Otonomi Desa; Merupakan Otonomi Asli, Bulat dan utuh*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2003.

Anwar Khairul, Muhammad Ras Muis, *Parlemen Desa Membangun Demokrasi Dari Bawah*, Unri Pers 2003.

Cahyono Heru, *Konflik Elit Politik DiPerdesaan*, Pustaka Pelajar, Jakarta 2005.

Kartono, Kartini *pemimpin dan Kepemimpinan*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta 2002

Labowo Muhadam, *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*, PT Rajawali Pers. Jakarta, 2006.

Siagian, Sondang P, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta 2004.

Singarimbun Masri, Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 2006.

Soekanto Soejono, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, PT Rajawali Grafindo Persada. Jakarta, 2005.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Peraturan Desa

Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999, Fokus Media 2004

Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004, Fokus Media 2004

Anwar Khairul, Muhammad Ras Muis, *Parlemen Desa Membangun Demokrasi Dari Bawah*, Unri Pers 2003.

Kartono, Kartini *pemimpin dan Kepemimpinan*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta 2002

Labowo Muhadam, *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*, PT Rajawali Pers. Jakarta, 2006.

Peraturan pemerintah Nomor 76 Tahun 2001

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 41 Tahun 2002

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 : Populasi dan Sampel	37
Tabel IV.1 : Klasifikasi Penduduk Desa Rambah Jaya Menurut Suku	41
Tabel IV.2 : Klasifikasi Penduduk Desa Rambah Jaya Menurut Jenis Kelamin.....	42
Tabel IV.3 : Klasifikasi Penduduk Desa Rambah Jaya Menurut Umur	42
Tabel IV.4 : Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Rambah Jaya	43
Tabel IV.5 : Fasilitas Pendidikan Formal di Desa Rambah Jaya	44
Tabel IV.6 : Mata Pencarian Penduduk Desa Rambah Jaya	45
Tabel IV.7 : Agama Penduduk Desa Rambah Jaya	46
Tabel IV.8 : Rumah Ibadah di Desa Rambah Jaya	46
Tabel V.1 : Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	50
Tabel V.2 : Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Umur	51
Tabel V.3 : Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	52
Tabel V.4 : Distribusi Jawaban Responden Mengenai Anggota BPD Mengerti Tugas, Kewajiban Dan Wewenang Desa	53
Tabel V.5 : Distribusi Jawaban Responden Tentang sudah terlaksana atau tidak fungsinya	54
Tabel V.6 : Distribusi Jawaban Responden mampu tidak BPD melakukan fungsinya	55
Tabel V.7 : Distribusi Jawaban Responden butuk atau tidaknya kantor secretariat	55

Tabel V.8 : Distribusi Jawaban Responden Tentang apakah cukup tersedianya sarana dan prasarana pendukung fungsinya	56
Tabel V.9 : Distribusi Jawaban Responden Tentang apakah pengaruh sarana dan prasarana pendukung bagi pelaksanaan fungsinya	57
Tabel V.10 : Distribusi Jawaban Responden Tentang pernah tidaknya BPD merumuskan peraturan Desa	58
Tabel V.11 : Distribusi Jawaban Responden Tentang pemerintahan desa meminta pertimbangan (pendapat)	59
Tabel V.12 : Distribusi Jawaban Respoden Tentang sesuai atau tidaknya peraturan desa	60
Tabel V.13 : Distribusi Jawaban Responden Mengenai butuh tidaknya anggaran dalam menjalankan fungsinya	61
Tabel V.14 : Distribusi Jawaban Responden tentang cukup atau tidaknya anggaran dalam menjalankan fungsinya	61
Tabel V.15 : Distribusi Jawaban Responden Tentang sudah mendukung atau belum anggaran yang ada untuk pelaksanaan fungsinya.....	62
Tabel V.16 : Distribusi Jawaban Responden Tentang mengerti tidaknya akan fungsinya pemerintahan desa	63
Tabel V.17 : Distribusi Jawaban Responden Tentang pernah melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan Desa	64
Tabel V.18 : Distribusi Jawaban Responden Tentang terlaksana atau tidak fungsi kinerja pemerintahan desa	64
Tabel V.19 : Distribusi Jawaban Responden Tentang pemerintah desa meminta pertimbangan kepada BPD	65
Tabel V.20 : Distribusi Jawaban Responden Tentang pemerintah Desa mengundang BPD dalam setiap musyawarah	66

Tabel V.21 : Distribusi Jawaban Responden Tentang pemerintah Desa melibatkan BPD dalam membahas APBDes	66
Tabel V.22 : Distribusi Jawaban Responden Tentang BPD mengawasi anggaran APBDes	67
Tabel V.23 : Distribusi Jawaban Responden Tentang pemerintah mempertanggung jawabkan kepada BPD	68
Tabel V.24 : Distribusi Jawaban Responden Tentang kebutuhan akan peraturan Desa	68
Tabel V.25 : Distribusi Jawaban Responden Tentang BPD membuat kegiatan yang menumbuh kembangkan kreativitas masyarakat desa Rambah Jaya	69
Tabel V.26 : Distribusi Jawaban Responden Tentang BPD menampung aspirasi masyarakat desa Rambah Jaya	70
Tabel V.27 : Distribusi Jawaban Responden Tentang BPD menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Rambah Jaya	71
Tabel V.28 : Distribusi Jawaban Responden Tentang BPD mengajak masyarakat Desa Rambah Jaya dalam penyelesaian masalah	72
Tabel V.29 : Distribusi Jawaban Responden Tentang masyarakat memberikan saran kepada BPD	73
Tabel V.30 : Distribusi Jawaban Responden Tentang masyarakat mengevaluasi kinerja BPD desa Rambah Jaya	74

DAFTAR PERTANYAAN
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MEWUJUTKAN
OTONOMI DESA DI DESA RAMBAH JAYA KECAMATAN BANGUN PURBA
KABUPATEN ROKAN HULU

A. Identitas Peneliti

Nama : Sugeng tri handoko
Nim : 10576002280
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : IX (Sembilan)
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas : UIN Suska Riau

B. Identitas Responden

Nama :
Umur :
Jenis kelamin :
Tingkat pendidikan :
Pekerjaan :

C. Petunjuk Pengisian

1. Angket ini hanya dimaksudkan untuk keperluan ilmiah (Penulisan Skripsi), Oleh karena itu diharapkan kepada bapak/ibu untuk dapat kiranya memberikan informasi / data sesuai dengan fakta yang ada.
2. Bacalah setiap pertanyaan dengan seksama
3. Jawablah pertanyaan dengan jujur dan berdasarkan fakta yang ada.
4. Berilah tanda X pada setiap jawaban yang dipilih
5. Atas Kerja sama dan bantuan yang bapak /ibu berikan saya ucapkan terimakasih.

D. Pertanyaan Yang Berhubungan Dengan Variabel Penelitian

1. Apakah Bapak/Ibu selaku BPD tahu dan mengerti apa saja tugas, kewajiban dan wewenang Pemerintahan Desa?
 - a. Sangat tahu
 - b. Tahu
 - c. Cukup tahu
 - d. Kurang tahu
 - e. Tidak tahu

2. Apakah Bapak/Ibu selaku BPD pernah melakukan pengawasan terhadap/kinerja Pemerintahan Desa?
 - a. Selalu
 - b. Pernah
 - c. Kadang-kadang
 - d. Sangat jarang
 - e. Tidak pernah
3. Menurut Bapak/Ibu selaku BPD apakah Pemerintah Desa sudah dengan baik menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Pemerintahan Desa?
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Cukup baik
 - d. Kurang baik
 - e. Belum baik
4. Menurut Bapak/Ibu selaku BPD apakah Pemerintahan Desa sudah dengan baik menjalankan setiap peraturan desa yang telah dibuat?
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Cukup baik
 - d. Kurang baik
 - e. Belum baik
5. Apakah Bapak/Ibu selaku BPD tahu apa saja yang menjadi program Pemerintahan Desa di desa ini?
 - a. Sangat tahu
 - b. Tahu
 - c. Cukup tahu
 - d. Kurang tahu
 - e. Tidak tahu
6. Menurut Bapak/Ibu selaku BPD apakah program-program Pemerintahan Desa sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat?
 - a. Sangat sesuai
 - b. Sesuai
 - c. Cukup sesuai
 - d. Kurang sesuai
 - e. Tidak sesuai
7. Apakah Bapak/Ibu selaku BPD tahu tentang Penganggaran Belanja Dan Pendapatan Desa (APBDesa) di desa ini?
 - a. Sangat tahu
 - b. Tahu
 - c. Cukup tahu
 - d. Kurang tahu
 - e. Tidak tahu
8. Apakah Bapak/Ibu selaku BPD mengetahui penganggaran yang digunakan oleh Pemerintahan Desa?
 - a. Sangat mengetahui
 - b. Mengetahui
 - c. cukup mengetahui
 - d. Kurang mengetahui
 - e. Tidak mengetahui

9. Apakah BPD pernah melakukan pengawasan terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDDesa)?
 - a. Selalu
 - b. Pernah
 - c. Kadang-kadang
 - d. Sangat jarang
 - e. Tidak pernah
10. Apakah BPD pernah melakukan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa tentang pelaksanaan keputusan desa dan kebijaksanaan lainnya?
 - a. Selalu
 - b. Pernah
 - c. Kadang-kadang
 - d. Sangat jarang
 - e. Tidak pernah
11. Apakah Bapak/Ibu selaku BPD tahu dan mengerti tentang Otonomi desa?
 - a. Sangat tahu
 - b. Tahu
 - c. Cukup tahu
 - d. Kurang tahu
 - e. Tidak tahu
12. Apakah Kepala Desa pernah melaporkan kerja Pemerintahan Desa kepada BPD?
 - a. Selalu
 - b. Pernah
 - c. Kadang-kadang
 - d. Sangat jarang
 - e. Tidak pernah
13. Apakah Bapak/Ibu selaku BPD pernah melakukan pemeriksaan terhadap Administrasi Pemerintahan Desa?
 - a. Selalu
 - b. Pernah
 - c. Kadang-kadang
 - d. Sangat jarang
 - e. Tidak pernah
14. Apakah Bapak/Ibu selaku BPD pernah melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan peraturan-peraturan lainnya?
 - a. Selalu
 - b. Pernah
 - c. Kadang-kadang
 - d. Sangat jarang
 - e. Tidak pernah
15. Apakah Bapak/Ibu selaku BPD pernah melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan keputusan Kepala Desa?
 - a. Selalu
 - b. Pernah
 - c. Kadang-kadang
 - d. Sangat jarang
 - e. Tidak pernah

16. Apakah Bapak/Ibu selaku BPD pernah melakukan pemeriksaan terhadap kebijaksanaan Pemerintahan Desa?
 - a. Selalu
 - b. Pernah
 - c. Kadang-kadang
 - d. Sangat jarang
 - e. Tidak pernah
17. Apakah Bapak/Ibu selaku BPD pernah membandingkan hasil pemeriksaan dengan rencana yang telah ditetapkan?
 - a. Selalu
 - b. Pernah
 - c. Kadang-kadang
 - d. Sangat jarang
 - e. Tidak pernah
18. Apakah Bapak/Ibu selaku BPD pernah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa?
 - a. Selalu
 - b. Pernah
 - c. Kadang-kadang
 - d. Sangat jarang
 - e. Tidak pernah
19. Apakah Bapak/Ibu selaku BPD pernah meminta keterangan berkenaan dengan suatu kebijakan Pemerintahan Desa?
 - a. Selalu
 - b. Pernah
 - c. Kadang-kadang
 - d. Sangat jarang
 - e. Tidak pernah
20. Apakah Bapak/Ibu selaku BPD pernah mengajukan perubahan terhadap setiap rencana Peraturan Desa?
 - a. Selalu
 - b. Pernah
 - c. Kadang-kadang
 - d. Sangat jarang
 - e. Tidak pernah